BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berakhirnya pemerintahan orde baru sangat berpengaruh besar terhadap sistem pemerintahan dan tatanan pemerintahan daerah, perubahan sistem kekuasaan pasca orde baru menjadi pasca reformasi membawa semangat perubahan baru terhadap tatanan pemerintah negara. Hal ini ditandai dengan banyaknya muncul berbagai tuntutan-tuntutan atas ketidakpuasan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Mulai dari pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirasa tidak adil, Ketimpangan pembangunan, efisiensi pelayanan masyarakat hingga pengolahan sumber daya alam yang belum stabil. Kemudian inilah yang mendorong pemerintahan untuk mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Upaya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah secara konsisten begitu penting dan sekarang dianggap masalah besar karena menyebabkan akan mempercepat proses pembangunan demokrasi di indonesia, mempercepat pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dan mempercepat proses pemberdayaan bagi masyarakat.[1]

Disamping itu juga, permasalahan otonomi daerah khususnya setalah runtunya orde baru, menjadi salah satu topik hangat yang tidak lepas dari adanya desakan dari daerah untuk menuntut mendapatkan kewenangan mengurus pemerintahan daerah yang lebih luas. Maka pemerintah merespon hal ini dengan mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. UU tersebut secara komprehensif memberi

[1] Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA, *Otonomi Daerah Dan Demokrasi Bangsa*, Jakarta Selatan, Yarsifwatampone, Cet Ke-2, h. 20.

kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahanya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelolah sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat serta membangun daerahnya sendiri sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009.[2]

Politik diskursus tentang aspirasi dan tuntutan masyarakat di berbagai daerah yang begitu massif akan otonomi daerah baru tidak sampai disitu saja. Fluktuasi penomena tersebut mengalami suatu kondisi yang berkembang pesat dan tidak terkendali.

Selain itu, euforia otonomi daerah yang masih berlangsung di tengah-tengah masyarakat, tidak diikuti dengan perubahan kultur dan sumber daya manusia yang memadai. Cara kerja dan mutu layanan publik yang diberikan kepada msyarakat belum terlihat ada perubahan yang signifikan seperti cita-cita UU otoda didengungkan.

Oleh karena itu, diskursus tersebut pun menimbulkan permasalahan besar terhadap daerah otonomi. Sehingga pemerintah merespon dengan undang-undang baru yaitu UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. UU ini memberikan kesempatan dalam pembentukan lokal NKRI berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kawasan budaya, sosial politik, kependudukan, kewilayahan, dan pertimbangan lainnya. Dalam perkembangan pemekaran di seluruh Indonesia bisa dilihat sebelum pasca reformasi, jumlah daerah otonom di Indonesia sebanyak 249

[2]http://www.balitbangham.go.id, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di akses tanggal 10 oktober 2019.

kabupaten 65 kota dan 27 provinsi. Namun, pasca reformasi hingga pada tahun 2009,[3] terdapat peningkatan yang luar biasa sehingga terdiri dari 34 provinsi, 414 kebupaten dan 97 kota di indonesia.[4]

Di provinsi Sumatra Selatan telah melakukan pemekaran kabupaten/kota dari berbagai daerah kabupaten/kota yang wilayanya luas sehingga melahirkan kabupaten/kota yang baru yang semula dari 7 kabupaten/kota hingga menjadi 17 kabupaten/kota sampai saat ini. Adapun kabupaten/kota yang di mekarkan yaitu :

1. Kota Pagar Alam, pemekaran dari Kabupaten Lahat (21 Juni 2001).
2. Kota Prabumulih, pemekaran dari Kabupaten Muara Enim (21 Juni 2001).
3. Kabupaten Banyuasin, pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin (10 April 2002).
4. Kabupaten Ogan Ilir, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (18 Desember 2003).
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (18 Desember 2003).
6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (18 Desember 2003).
7. Kota Lubuklinggau, pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas (21 Juni 2001).
8. Kabupaten Empat Lawang, pemekaran dari Kabupaten Lahat (2 Januari 2007).

[3] Lukman santoso, *problematika pemeka ran pasca reformasi di indonesia*, jurnal supremasi hukum Vol. 1, No. 2, desember 2012

[4] Herman Kombuno"Pemekaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah", h. 5.

9. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pemekaran dari Kabupaten Muara Enim (14 Desember 2012).

Kabupaten Musi Rawas Utara, pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas (Juni 2013).[5] Dalam perjalanannya, berdasarkan KEPPRES No. 37 tahun 2003 tentang pembentukan pemerintah daerah di Indonesia terjadi di provinsi Sumatera Selatan yaitu kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).[6]

Kabupaten OKI saat ini meliputi 18 kecamatan, 314 desa dan 13 kelurahan, dengan ibukota di Kecamatan Kayu Agung. Luas wilayah Kabupaten OKI mencapai 19.023,47 km2 (lebih dari 50 persen dari luas Provinsi Jawa Barat),[7] dengan wilayah yang sangat luas membuat pelayanan bagi masyarakat yang kurang maksimal dan insfrastruktur pembangunan yang sering terjadi tidak merata, kondisi inilah yang melatarbelakangi mendorong ,dimana adanya keinginan masyarakat kawasan Pantai Timur ingin membentuk kabupaten baru. Yang di mana juga sebelumnya kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga sudah melahirkan kabupaten Ogan Ilir (OI) pada tahun 2003. Dan hari ini wilayah Pantai Timur sedang bergejolak untuk melakukan pemekaran untuk membentuk kabupaten baru yakni yang meliputi lima kecamatan, yaitu Air sugian (2.251,07 km2), Tulung selapan (5.363,85 km2), Cengal (3.038,66

[5] http://www.bps.go.id/mstkab/mf2007, Daftar nama provinsi, kabupaten, kota menurut dasar hukum pembentukan wilayah, di akses pada tanggal 22 november 2019
[6] http://www.kaboki.go.id , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Diakses Tanggal 10 Oktober 2019
[7] Atep Afia Hidayat, *Kab Oki dan Kab Pantai Timur*, http://kpu.go.id/dmdocuments/1602_OKI.pdf , Diakses Tanggal 10 Oktober 2019.

km2), Sungai menang (2.305,42 km2) dan Pangkalan lampam (1.104,75 km2), [8] Dari persyaratan di peraturan undang undang No.32 Tahun 2004 sudah memenuhi yang merupakan paling sedikit lima kecamatan untuk membentuk kabupaten baru.

Pemekaran Pantai Timur secara teknis ini merujuk ke PP 78 Tahun 2007 yang di mana sebuah wadah aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran itu harus melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Forum Komunikasi Keluraham (FKK). Dengan demikian harus adanya persetujuan dari desa-desa dalam kecamatan yang terlibat. Hal ini sangatlah sulit untuk memintah persetujuan tersebut. Namun terus berusaha untuk dapat meyakinkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyetujui pemekaran. Dengan kata lain, atas perjuangan dan usaha untuk meyakinkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membuahkan hasil keputusan BPD/FKK 75 desa dari 87 desa yang ada,[9] bahwasannya setuju untuk melakukan pemekaran. Pada titik tersebut, telah dirasakan memenuhi syarat Bersadarkan aspirasi masyarakat inilah sebagai modal dasar untuk melakukan mengajuan pemekaran daerah untuk bisa di bawa ke DPR agar dapat dibahas dan di paripurnakan.

Diskursus akan pemekaran untuk membentuk kabupaten baru ini muncul pada tahun 2000 hingga mencuat pada tahun 2002. Ide ataupun aspirasi tersebut disampaikan kepada DPRD kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Langkah awal yang dilakukan adalah menghimpun dukungan dalam bentuk tanda tangan masyarakat luas dan dukungan tokoh-tokoh di kecamatan yang di rencanakan bergabung. Dalam proses

[8] Atep Afia Hidayat, *Kab Oki dan Kab Pantai Timur*, http://kpu.go.id/dmdocuments/1602_OKI.pdf , Diakses Tanggal 10 Oktober 2019.
[9] Ajar Etikana,(2010) Dokumen Presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI)

perjuangan ini terus berlanjut dan sudah sampai 10 tahun lebih. selama masa itu juga, sudah beberapa kali berubah wadah perjuangan, yang di mana dua kali melewatkan kesempatan emas, dan tiga kali penelitian daerah yang kerjasama dengan pihak ketiga yaitu STPDN, UNPAD, dan BALITBANG DEPDAGRI**.** Dengan demikian sampai perjalanannya keluar amanat presiden (AMPRES) dan menunggu keputusan presiden (KEPRES) untuk dapat di resmikan pemekaran wilayah Pantai Timur.

Berangkat dari data dan realitas diatas, hal ini juga yang membuat berbagai pertanyaan muncul baik dari masyarakat dan terutama pada peneliti sendiri terhadap kabupaten pantai timur masih belum terjadi pemekaran seperti dicita-citakan dari dahulu? Dan sebagian masyarakat belum mengetahui alasan apa yang menjadi dasar keinginan pemekaran kabupaten pantai timur dari kabupaten ogan komering ilir. Oleh karena itu,

Penulis tertarik untuk mengangkat judul DISKURSUS POLITIK DALAM PROSES PEMEKARAN WILAYAH PANTAI TIMUR

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur
2. Bagaimana penyebab wilayah Pantai Timur ini belum bisa menjadi kabupaten baru

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas ,maka tujuan dan maksud dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur
2. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan wilayah Pantai Timur ini belum bisa menjadi kabupaten baru

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberi sumbangsi pengetahuan dan keilmuan bagi mahasiswa dan masyarakat pantai timur terutama dalam proses politik memperjuangkan pemekaran wilayah pantai timur karna mengingat nantinya akan terjadi pemekaran wilayah Pantai Timur, penelitian ini akan membuka dan

menambah wawasan pengetahuan tentang daerah dan akan mengaplikasikan pengetahuan yang di proleh dari hasil perkuliahan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.

2. Kegunaan praktis
    1. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberi informasi dan meraka dapat mengetahui bagaimana diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur dan dapat mengetaui juga apa yang menyebabkan wilayah pantai timur ini belum bisa menjadi kabupaten baru, ini juga dapat menambah wawasan tentang keilmuan sosial dan dapat di jadikan bahan diskusi di perkulihan.
    2. Bagi dosen, penelitian ini akan memberikan informasi tentang perkembangan kabupaten yang ada di sumsel dan juga dapat dijadikan bahan materi bagi dosen untuk memberikan informasi bagi mahasiswa serta di jadikan bahan diskusi.

E. Tinjauan Pustaka

Dari hasil penelitian sebelumnya di ketahui beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Rifki Pratama, (2010) dengan judul "*Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tanggeran Selatan"*.[10] Penulis tersebut menyimpulkan bahwa pemekaran ini bertujuan untuk

[10] Muhammad Rifki Pratama. (2010). *Politik Pemekaran Wilayah Kasus Proses Pembentukan Kota Tanggerang Selatan*, Skripsi Ilmu politik, Jakarta fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, pemekaran ini juga memiliki filosofi penting dalam konsep kelembagaannya, yaitu menjaga kenekaragaman adat istiadat daerah yang telah menjadi ciri khusus dalam budaya nasional sehingga terhindar dari kontaminasi budaya barat yang semakin berkembang, dan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bagi bangsa indonesia.

Skripsi ini menggunakan teori desentralisasi sebagai wujud dari tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara, khususnya di tingkat daerah, karena salah satu prinsip demokrasi yang sejalan dengan ide desentralisasi adalah adanya partisipasi dari masyarakat. Hal ini berbeda dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu dengan judul *Diskursus Politik Dalam Proses P*tik yang menyatakan bahwa politik itu di dominasi oleh segelintir orang.

Dalam pelaksanaan pemekaran kota tanggeran selatan memiliki persamaan dengan pemekaran wilayah pantai timur Ogan Komering Ilir yaitu sama-sama merujuk kepada Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang secara prosedur merujuk ke PP 78 Tahun 2007 yang berupa syarat administrasif, teknis, dan fisik kewilayaan, yang dalam hal ini juga yang di lakukan oleh segenap penyelenggarah dalam pemekaran wilayah.

Kedua jurnal di tulis oleh Lukman santoso (2012), dengan judul *Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*,[11] jurnal ini menjelaskan tentang problematika pemekaran yang ada di Indonesia dari mulai keluarnya UU No 22 Tahun

[11] Lukman santoso (2012), *Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia,* supremasi hokum Vol. 1, No. 2, Desember 2012

1999 yang kemudian di revisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah. Problematika pemekaran di indonesia dalam pelaksanaanya ternyata menjadi faktor politik lebih dominan dalam proses pemekaran daerah.

Jurnal ini menjelaskan konsep demokrasi sejalan dengan konsep desentralisasi, perspektif di gunakan jurnal ini ialah menggunakan perspektif desentralisasi politik dan perspektif desentralisasi administrasi. Perspektif desentralisasi politik menerjemahkan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sedangkan perspektif desentralisasi administrasi dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah**.** Kemudian hal ini berbeda dengan perspektif yang di gunakan oleh peneliti yaitu menggunakan persepektif elit lokal yang di mana mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mendorong domokratisasi di tingkat lokal.

Ketiga, jurnal yang di tulis oleh welhelmina selfina beli dengan judul *Peran Elit Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT.*[12] Jurnal ini juga mengungkapkan bahwa pemekaran sebagai proses "pemecahan kekuasaan" akhirnya mengarah pada konstetasi para pejabat-pejabat lokal untuk mengakui tuntutan-tuntutan lokal untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Elit politik lokal seperti haus akan kekuasaan, sebab mereka yang kalah dalam pilkada kadang menjadikan isu pemekaran ini sebagai sarana empuk dalam memobilisasi keinginan mereka untuk menggapai kekuasaan yang baru begitu juga dengan pemekaran

[12] Welhelmina selfina beli, *Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT,* Politika, Vol, No, 2, Okrober 2015

kabupaten pantar yang di dominasi oleh kepentingan elite dalam memperebutkan kekuasaan di tingkat lokal.

Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan juga penelitian ini di fokuskan pada peran elit politik dalam upaya mendukung pemekaran kabupaten kemudian bagaimana peran elit politik itu dalam proses mendukung pemekaran dan menganalisis peran lokal dalam upaya mewujudkan pemekaran kabupaten pantar provinsi nusa tenggara timur. hal ini berbeda dengan penelitian yang di teliti dengan mempokuskan pada upaya elit lokal dalam proses politik pemekaran wilayah pantai timur. Pada proses ini kenapa wilayah pantai timur masih belum bisa menjadi kabupaten baru padahal wilayah pantai timur ini sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004.

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh La ode risma dengan judul *"anailis proses pembentukan kabupaten buton selatan*" Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan kabupaten buton selatan ini peran elit lokal pembentukan darah otonom kabupaten buton selatan mengesankan pembangunan dan komunikasi pada elit pusat dengan proses menyiapkan tenokratis/administrasi atas sejumlah kekurangan persyaratan. Kebijakan pemekaran daerah berdasarkan PP 78 Tahun 2007 justru lebih menekankan pada proses-proses ruang politik. Meskipun nampak ada sejumlah permasalahan mendasar yang dapat menyebabkan terjadinya pembentukan kabupaten buton selatan. Namun dengan demikian semua elit tersebut tidak akan mencapai hasil seperti sekarang kalau tidak ada campur tangan dari elit loka, regional, dan pusat.

Skripsi ini menggunakan teori elit politik menurut Amitai Etzioni di definikan sebagai aktor yang mempunyai kekuasaan. Kemudian juga menggunakan elit politik lokal yang menurut Schoorl (schoorl (1980), yang di maksud dengan elit lokal adalah elite yang menempati kedudukan puncak di dalam struktur sosial di tingkat lokal. Dan mengunakan teori elite tradisional yang di jelaskan bahwa elite ialah kumpulan-kumpulan individu-individu yang memiliki kualitas peran dan menduduki strata sosial di dalam masyarakat yang membedakan dengan yang lainnya.[13] Dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang di teliti dengan menggunakan teori elit politik menurut Pareto (1848-1923), Bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlakukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik.

F. Kerangka Teori

1. Diskursus merupakan sebuah sistem berpikir, ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur dan budaya. Diskursus dalam pemekaran daerah merupakan wujud dari perencanaan dan pengembangan wilayah di indonesia. Dapat di katakan pemekaran wilayah berlangsung secara massif dan diskursus mengenai pemekaran daerah tidak lepas dari konteks otonomi daerah. Karna setiap daerah dapat membangun pemerintahan atas dasar kebutuhannya masing-masing yang pasti tidak lepas dari konteks kearifan lokal. Politik diskursus tentang aspirasi

[13] La ode risma, (2015), *Analisis Proses Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, Studi Tentang Tentang Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan*, Skripsi Ilmu Politik Pemerintahan, Makassar; Universitas Hasanuddin.

dan tuntutan masyarakat di berbagai daerah mengalami kondisi yang berkembang pesat dan tidak terkendali karena banyaknya tuntutan-tuntutan di berbagai daerah di indonesia yang menginginkan pembentukan otonomi baru.

Diskursus pemekaran wilayah akan selalu muncul apabilah suatu wilayah yang luas yang insfrastruktur pembangunanya tidak merata dan pelayanan kurang maksimal ini akan terjadi diskursus pemekaran wilayah. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Sumatra Selatan di Kabupaten Ogan komering Ilir (OKI) di Wilayah Kawasan Timur OKI yang menginginkan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah kawasan Timur OKI yaitu pembentukan Kabupaten Pantai Timur yang meliputi lima kecamatan yaitu Kec.Pangkalan lampam, Kec.Tulung selapan, Kec. Cengal, Kec. Air sugihan, Kec. Sungai menang. hal ini masih dalam proses untuk pembentukan wilyah pantai timur. Dalam prosesnya di mulai dari meminta persetujuan dari badan permusyawaratan desa (BPD) dan forum komunikasi kelurahan (FKK) yang terlibat dalam pemekaran wilayah pantai timur. Hingga pada sampai menunggu keluarnya keputusan presiden untuk dapat terjadi pemekaran wilayah pantai timur yaitu pembentukan otonomi baru.

2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini di definisikan dalam

UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.[14] Dalam konsepnya daerah-daerah otonom tetap merupakan bagian-bagian dari negara kesatuan republik indonesia guna untuk lebih mudah mengatur tatanan negara kesatuan. Dalam pemekaran wilayah Pantai Timur dari persyaratan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sudah memenuhi persyaratan yaitu paling sedikit lima kecamatan untuk membentuk kabupaten baru. Yang secara teknis merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran,penghapusan dan penggabungan daerah.

Pembentukan daerah otnomi baru telah membuka ruang kepentingan elit lokal tidak hanya menerima wewenang pemerintah pusat tapi juga turut mengupayakan agar jaminan kesejahteraan masyarakat menjadi pilihan pertama dalam agenda reformasi di tingkal lokal. Sekalipun pembentukan daerah otonomi baru memiliki prioritas terhadap pembangunan di daerah namun hal tersebut sangat sulit di capai kalau tidak ada peran elite-elite lokal mengawal pembentukan daerah yang di usulkan sampai pada pembahasan pemerintah pusat. Pemekaran ini juga sama seperti pemekaran di wilayah Pantai Timur yang memiliki peran elite lokal dalam mengawal pemekaran tersebut.

3. Teori elit politik, lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial amerika tahun 1950. Antara Schumpeter, lasswell (ilmuwan politik) dan sosiolog C.Wright Mils, yang

[14] Ari Wulandari, S.S., M.A. (2015), *Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia*, Yokyakarta; Penerbit Media Pressindo, Cet, Ke-1, h. 173.

melacak tulisan-tulisan dari para pemikiran Eropan masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, Roberto Michles dan Jose Oertega Y. Gasset.

Pareto (1848-1923), Bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlakukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik. Mereka yang bias menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik merekalah yang dikenal sebagai elit.

Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.

Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elit) dan elit yang tidak memerintah (non-govening elit), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang memerintah, yang menurut dia berkuasa karena bias menggabungkan kekuasaan-kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.[15]

Setiap kelompok selalu dapat terdapat segelintir orang yang lebih cakap dan berpengaruh dibandingkan dengan yang lainnya. Merekalah yang disebut dengan elit,

[15]S.P. Varman, (2001). Teori Politik Modern, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Cet, Ke-6, h. 200.

yaitu mereka yang tampil didepan sebagai pihak yang berpengaruh dalam kelompok. Dibandingkan pemerintahan, elit mampu meraih kekuasaan dan kedudukan dengan dua cara, yaitu (1) kekuasaan atau kekerasaan fisik, dan (2) siasat dan strategi politik.[16]

G. Metodelogi Penelitian

Metodelogi penelitian adalah suatu keseluruhan landasan nilai-nilai (yang menyangkut filsafat keilmuan) asumsi-asumsi, etika , norma yang menjadi aturan-aturan standar yang di gunakan untuk menafsirkan dan menyimpulkan data penelitian, yang di dalamnya termaksud kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian.[17]

1. Pendekatan/metode penelitian

   Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara

[16] Hendra Pratama (2014*) Peran Elit Politik Terhadap Masyarakat Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar*, Skripsi Ilmu Pilitik, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. H. 15. T.d.

[17] S. Aminah.Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, 2019, Prenademedia Group, Jakarta Timur, Cet Ke 1, Hal 61

naratif. Untuk menjelaskan penelitian yang di teliti tentang yang berkaitan dengan diskursus politik pemekaran wilayah pantai timur.

2. Data dan sumber

   a. Data Primer : Merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data utama langsung terjun ke lapangan di Kabupaten OKI kawasan Timur OKI wilayah Pantai Timur yaitu melalui wawancara dengan Tokoh masyarakat, Anggota DPR, dan Presedium Pemekaran kawasan Timur OKI (PPKT-OKI)

   b. Data Sekunder : Merupakan data yang di peroleh dari sumber kedua data sekunder yang fungsinya untuk melengkapi data primer. Biasanya data sekunder ini sangat membantu sekali bila data primer terbatas atau sulit di peroleh. Data diperoleh dari buku, dokumen panitia pemekaran wilaya pantai timur, jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan internet yang berkaitan dengan fokus penelitian yang di teliti yaitu Diskursus Politik Dalam Proses Pemekaran Wilayah Pantai Timur.

3. Teknik pengumpulan data

   Untuk mencari informasi dan sumber data pendukung untuk mendapatkan data-data yang ingin diperoleh, peneliti menggunakan teknik"

   a. Observasi

      Observasi adalah alat pengamatan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gelaja yang diselidiki, inti dari observasi

adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung dan dapat di ukur. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur.

b. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh ketenangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan inform atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Adapun wawancara ini akan dilakukan kepada Tokoh masyarakat, Panitia pemekaran wilayah Pantai Timur, Anggota DPR, dan Partai politik. yang terlibat dalam pemekaran pantai timur adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan inform atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara" Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sebagai panduan (interview guide). Data kedua wawancara tidak terstruktur yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul atau spontanitas

c. Dokumentasi (Deskripisi wilayah)

Dokumentasi yang dalam hal ini digunakan difokuskan pada tempat tinggal klien yang terletak di daerah di kabupaten OKI di wilayah pantai timur.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembuatan skripsi tersebut ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka dan gambaran terhadap objek penelitian yang diteliti atau memberi garis besar didalam pembahasan materi, untuk mempermudah pembaca dalam mengikuti penulisan skripsi ini. Maka peneliti memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

   Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodelogi penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian

   Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai lokasi yang di teliti di dalamnya meliputi : letak geografis, kondisi demografis, kondisi sosial dan kesejahteraan, kemudian menjelaskan pula tentang sejarah perjuangan pemekaran Pantai Timur.

3. Bab III Hasil dan Pembahasan

   Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang di tulis berdasarkan data yang sudah di dapatkan tentang diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah pantai timur.

4. Bab IV Penutup

   Pada bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dibuat, kemudian selanjutnya daftar pustaka berserta lampiran-lampiran pendukung.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan beberapa hal yang di anggap relevan dengan proses penelitian tentang lokasi penelitian yang di teliti oleh peneliti gambaran lokasi penelitian ini di harapkan mampu menjelaskan serta memberikan gambaran tentang objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ilir di kawasan timur OKI wilayah Pantai Timur dengan mengangkat judul Diskursus Politik Dalam Proses Pemekaran Wilayah Pantai Timur.

A. Letak Geografis

Lokasi penelitian yang berjudul Diskursus Politik Dalam Pemekaran Wilayah Pantai Timur, dengan studi kasus kabupaten Ogan Komering Ilir di kawasan timur OKI. Kemudian berpokuskan kepada proses pemekaran wilayah Pantai Timur yang di mana saat ini Pantai Timur masih belum terjadi pemekaran padahal wilayah Pantai Timur ini sudah memenuhi persyaratan yang menurut UU No 34 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang di mana untuk memekarkan suatu daerah untuk membentuk kabupaten ialah minimal lima kecamatan. Saat ini wilayah Pantai Timur sedang bergejolak untuk membentuk kabupaten baru. Secara teknis wilayah Pantai Timur ini merujuk kepada PP 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Pengahapusan dan Penggabungan Daerah.

Secara letak geografis menentukan letak posisi suatu posisi suatu daerah dengan daerah yang lain. Apabila di lihat dari letak geografis wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir terletak di bagian timur provinsi Sumatra Selatan yaitu Ogan Komering Ilir merupakan dataran rendah dengan ketinggian di antara rata-rata + 10 Meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi $2^0$30' lintang utara dan $4^0$15' lintang selatan, serta $104^0$20' dan $106^0$00' bujur timur, dengan luasnya mencapai 19.023,47 Km^2.[18] Dengan kepadatan penduduk di kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2018 mencapai 43 jiwa per Km2. Kabupaten Ogan Komering Ilir ini terdiri dari 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terketak di kecamatan SP Padang dengan keppadatan sebesar 456 jiwa/Km2 dan terendah terletak di kecamatan Tulung selapan sebesar 8 jiwa/Km2.

Wilayah Pantai Timur jika terjadi pemekaran wilayah Pantai Timur akan memiliki 5 kecamatan. yaitu Air Sugihan, Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang dan Pangkalan Lampam, dengan 95 desa dan satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tulung Selapan. Sedangkan Kabupaten OKI akan memiliki 13 kecamatan dan 339 desa yang beribu kota Kayuagung.

Secara administratisi kabupaten Ogan Komering Ilir ini berbatasan dengan wilayah :

1. Kabupaten Banyuasin, kabupaten Ogan Komering Ilir dan kota Palembang sebelah utara.

[18] BPS Kab.OKI Dalam Angka Tahun 2019, h. 9

2. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Provinsi Lampung di sebelah selatan.
3. Kabupaten Ogan Ilir di sebelah barat kemudian
4. Selat Bangka dan laut jawa di sebelah timur.

Secara administratisi wilayah Pantai Timur ini berbatasan dengan wilayah :

1. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten banyuasin
2. Sebelah selatan perbatasan dengan Provinsi Lampung
3. Sebelah timur perbatasan dengan selat Bangka dan laut jawa
4. Sebelah barat perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sementara ini, di wilayah Pantai Timur sekarang masih tercangkup di Kabupaten Ogan Komering Ilir di karnakan sampai saat ini Pantai Timur masih belum terjadi pemekaran jika terjadi pemekaran akan terjadi perubahan yang signifikan baik dari segi pemerintahan, luas wilayah, kependudukan dan yang lain sebagai nya baik di kabupaten OKI maupun Di wilayah Pantai Timur

GAMBAR 1.1 peta wilayah kabupaten ogan komering ilir dan wilayah pantai timur perbatasannya

di lihat dari peta di atas bahwa luas kabupaten Ogan Komering Ilir mencapai 19.023,47 Km². jika terjadi pemekaran, kabupaten Ogan Komering Ilir akan memiliki luas 4.959.27 Km2 dan wilayah Pantai Timur 14.63,73 Km2 bahkan wilayah Pantai Timur lebih luas sekitar 73,93 persen dari pada luas Kabupaten Ogan Komering Ilir. Hal ini merupakan gabungan luas wilayah di lima kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Pangkalan Lampam, luas wilayah 1.104,75 Km2.
b. Kecamatan Tulung Selapan, luas wilayah 5.363.65 Km2.
c. Kecamatan Cengal, Luas wilayah 3.038,66 Km2.

d. Kecamatan Air Sugian, Luas wilayah 2.251,07 Km2.

e. Kecamatan Sungai Menang, luas wilayah 2.305,42 Km[19]

Batas batas wilayah Pantai Timur yang mencangkup di lima kecamatan tersebut dengan perbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir jika terjadi pemekaran secara administasinya ialah :

TABLE 1.1
WILAYAH PERBATASAN PERKECAMATAN DI WILAYAH PANTAI TIMUR

NO	KECAMATANs	WILAYAH PERBATASAN
1	Kec. Sungai menang	Utara : Kecamatan Cengal Selatan : Provinsi Lampung Timur : Laut jawa Barat : Kecamatan Mesuji
2	Kec. Tulung selapan	Utara : Kecamatan Air sugian Selatan : Kecamatan Cengal Timur : Laut Jawa Barat : Kececamatan Pangkalan Lampam
	Kec. Cengal	Utara : Kecamatan Tulung selapan Selatan : Kecamata Sungai menang Timur : Laut jawa Barat : Kecamatan Pedamaran
4	Kec Pangkalan Lampam	Utara : Kabupaten Banyuasin Selatan : Kecamatan Pampangan

[19] Atep Afia Hidayat, *Kab OKI dan Kab Pantai Timur* ,http://kpu.go.id/dmdocuments/1602_OKI.pdf di akses pada tanggal 22 januari 2020

		Timur : Kecamatan Pangkalan lampam Barat : Kecamatan Tulung selapan
5	Kec. Air sugian	Utara : Kabupaten Banyuasin Selatan : Kecamatan Pangkalan lampam Timur : Selat Bangka Barat : Kabupaten Banyuasin

SUMBER : Diolah oleh peneliti dari BPS Kab. OKI dalam angka Tahun 2018

Di lihat dari table di atas merupakan wilatah perbatasan Pantai Timur yang mencangkup di lima kecamatan hal ini merupakan batas wilayah menurut administrasi namun di lima kecamatan tersebut tentu mempunyai beberapa desa yaitu :

a. Kecamatan Sungai Menang memiliki sebanyak 18 Desa
b. Kecamatan Tulung Selapan memiliki sebanyak 23 Desa.
c. Kecamatan Cengal memiliki sebanyk 17 Desa.
d. Kecamatan Air Sugian memiliki sebanyak 19 Desa.
e. Kecamatan Pangkalan lampam memilki sebanyak 19 Desa.

Adapun desa-desa yang mencangkup di lima kecamatan wilayah pantai timur

1. Kecamatan Sungai Menang yang wilayahnya meliputi :

TABLE. 1.2
KECAMATAN SUNGAI MENANG

NO	Kelurahan /Desa	Luas (Km^2)	Persentase Terhadap Luas kecamatan
1.	Sungai Tepuk	161.00	5.82
2	Sido Mulyo	100.00	3.61
3	Talang Jaya	152,01	2.25
4	Sungai Menang	290.00	10.48
5	Karangsia	370.00	13,37
6	Talang Makmur	74.00	2.67
7	Harapan Jaya	53.40	1.93
8	Sungai Ceper	450.00	16.26
9	Gajah Mati	410.00	14.81
10	Bumi Pratama Mandira	200.00	7.22
11	Sungai Pinang Indah	250.00	9.03
12	Sungai Sibur	250.36	9.04
13	Gajah Mukti	14.60	0.53
14	Gajah Mulya	13.00	0.47
15	Gajah Makmur	20.00	0.72
16	Seri Gading	11.33	0.41
17	Gading Jaya	13.36	0.48
18	Gading Mas	16.70	0.60

SUMBER : Diolah oleh peneliti dari BPS Kab. OKI Kec. Sungai Menang dalam angka Tahun 2019.

2. Kecamatan Tulung Selapan, yang wilayahnya meliputi :

TABLE 2.1
KECAMATAN TULUNG SELAPAN

NO	Kelurahan /Desa	Luas (Km^2)	Persentase Terhadap Luas kecamatan
1.	Pulu Beruang	194,65	4,01
2	Tulung Selapan Ilir	118,64	2,45
3	Tulung Selapan Ulu	152,01	3,13
4	Petaling	46,34	0,95
5	Kayu Ara	179,82	3,70
6	Penyandingan	166,84	3,44
7	Tanjung Batu	203,91	4,2
8	Cambai	222,45	4,58
9	Toman	240,99	4,97
10	Jeramba Rengas	222,45	4,58
11	Penaggoan Duren	205,77	4,24
12	Lebung Itam	187,23	3,86
13	Lebung Gajah	196,50	4,05
14	Ujung Tanjung	324,41	6,68
15	Simpang Tiga	658,09	13,56
16	Simpang Tiga Sakti	107,77	2,22
17	Simpang Tiga Makmur	276,21	5,69

18	Simpang Tiga Jaya	372,61	7,68
19	Rantau Lurus	148,30	3,05
20	Tulung Seluang	189,08	3,9
21	Simpang Tiga Abadi	173,77	3,58
22	Kuala Dua Belas	206,23	4,25
23	Tulung Selapan Timur	59,32	1,22
		4,853,00	100,00

SUMBER : Diolah oleh peneliti dari BPS Kab. OKI Kec. Tulung Selapan dalam angka Tahun 2019

3. Kecamatan Cengal, yang wilayahnya meliputi :

TABLE 2.2
KECAMATAN CENGAL

NO	Kelurahan /Desa	Luas (Km^2)	Persentase Terhadap Luas kecamatan
1.	Sungai Somor	322.06	13.90
2	Sungai Pasir	41.91	1.81
3	Sungai Jeruju	154.71	6.68
4	Sungai Lumpur	80.00	3.24
5	Ulak Kedondong	283.07	12.22
6	Sungai Ketupat	205.8	8.88
7	Pelimbangan	186.47	8.05
8	Cengal	418.97	18.09
9	Talang Rimba	230.33	9.49
10	Kuala Sungai Pasir	13.97	0.60
11	Kuala Sungai Jeruju	124.40	5.37
12	Parit Raya	23.61	1.02

13	Lebak Beriang	47.30	2.04
14	Kebon Cabe	57.28	2.47
15	Balam Jeruju	30.89	1.33
16	Adil Makmur	54.41	2.23
17	Pantai Harapan	44.49	1.92

SUMBER : Diolah oleh peneliti dari BPS Kab. OKI Kec. Cengal dalam angka Tahun 2019

4. Kecamatan Air Sugian, yang wilayahnya meliputi :

TABLE 2.3
KECAMATAN AIR SUGIAN

NO	Kelurahan /Desa	Luas (Km^2)	Persentase Terhadap Luas kecamatan
1.	Sungai Batang	179.3	6.26
2	Bukit Batu	173.12	6.04
3	Rengas Abang	79.07	2.76
4	Simpang Heran	413.44	14.44
5	Banyu Biru	173.12	6.04
6	Pangkalan Sakti	143.44	5.01
7	Rantau Karya	143.44	5.01
8	Nusa Karta	143.44	5.01
9	Srijaya Biru	143.44	5.01
10	Jadi Mulya	143.44	5.01
11	Suka Mulya	143.44	5.01
12	Mukti Jaya	143.44	5.01
13	Kertamukti	143.44	5.01
14	Negeri Sakti	125.51	4.38

15	Pangkalan Damai	69.03	2.41
16	Nusantara	143.44	5.01
17	Bandar Jaya	143.44	5.01
18	Tirta Mulya	91.71	3.20
19	Marga Tani	125.25	4.37

SUMBER : Diolah oleh peneliti dari BPS Kab. OKI Kec. Air Sugian dalam angka Tahun 2019

5. Kecamatan Pangkalan Lampam, yang wilayahnya meliputi :

TABLE 2.4
KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM

NO	Kelurahan /Desa	Luas (Km^2)	Persentase Terhadap Luas kecamatan
1.	Sungai Bungin	210.84	18.50
2	Suka Raja	64.98	5.70
3	Darat	25.51	2.24
4	Suka Damai	5.24	0.46
5	Lebung Batang	4.8	0.42
6	Pangkalan Lampam	26.54	2.33
7	Lirik	16.23	1.42
8	Deling	26.46	2.32
9	Talang Jaya	15.39	1.35
10	Air Pedara	8.73	0.77
11	Rimba Samak	12.66	1.11
12	Pulauan	25.15	2,20
13	Riding	383.79	33.67

14	Sunggutan	24.62	2.16
15	Air Rumbai	11.35	1.00
16	Rambai	84.06	7.38
17	Perigi	82.64	7.25
18	Bukit Batu	70.18	6.16
19	Rawa Tenam	40.58	3.56

SUMBER : Diolah oleh peneliti dari BPS Kab. OKI Kec. Pangkalan Lampam dalam angka Tahun 2019

B. Kondisi demografis

1. Penduduk

Peduduk kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 819.570 jiwa yang terdiri atas 418.785 jiwa penduduk laki-laki dan 400.785jiwa penduduk perempuan. Jika di bandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami pertumbuhan sebesar 1,28 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,30 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,39 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin lpada tahun 2018 penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebesar 104. Kemudian kepadatan penduduknya mencapai 43 jiwa/Km2.dari kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di

kecamatan SP Padang kepadatan sebesar 456 jiwa/Km2 dan yang terendah terletak di kecamatan Tulung selapan sebesar 8 Jiwa/Km2. [20]

kemudian dengan jumlah penduduk dan kepadatan Kabupaen OKI di angka penduduk 819.570 jiwa, dan kepadatannya 43 jiwa/Km2. Lalu berapa jumlah penduduk dan kepadatan di wilayah Pantai Timur dikarnakan di wilayah tersebut merupakan wilayah yang akan membentuk otonomi baru atau kabupaten baru dengan mencangkup di lima kecamatan yaitu Kecamatan Kec. Sungai menang, Kec. Tulung selapan, Kec. Cengal, Kec. Pangkalan lampam dan Kec. Air sugian. Hal ini di muat oleh peneliti di table di bawah ini :

TABLE 2.5
Jumlah penduduk, laju pertumbuhan persentase, kepadatan,rasio Kabupaten Ogan Komering Ilir di Wilayah Pantai Timur dalam angka tahun 2018

No	Kecmatan	Jumah pendudu	Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2017-2018	Persentase	Kepadatan	Rasio
1	Kec.Sungai Menang	52.475 jiwa	1,48 persen	6,40	23 jiwa/Km2	110
2	Kec.Tulung selapan	45.488 jiwa	1,48 persen	5,55	8 Jiwa/Km2	104
3	Kec.Cengal	49,483 jiwa	1,51 persen	6,08	16 Jiwa/Km2	110
4	Kec.Pangkalan lampam	29,165 jiwa	1,73 persen	3,56	26 Jiwa/Km2	99

[20] BPS Kab.OKI Dalam Angka Tahun 2019, h. 51

5	Kec.Air sugian	36,664 jiwa	1,53 persen	4,47	16 Jiwa/Km2	107

SUMBER : Diolah oleh peneliti dari BPS Kab. OKI dalam angka Tahun 2019

Secara administratif wilayah Pantai Timur ini masih terkmaksud wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir, hanya saja wilayah Pantai Timur ini ingin memisahkan diri dari kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membentuk otonomi baru ialah kabupaten Pantai Timur yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2018 adalah 213,653 jiwa, wilayah Pantai Timur ini memiliki luas mencapai 14.063,73 Km2 dan di 5 kecamatan.

2. Ketenaga kerjaan

Pada tahun 2018 jumlah angakatan kerja di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah 413,021 orang, dengan komposisi 402,256 bekerja dan 10,765 pengangguran terbuka. Dari data tersebut sudah termasuk juga di wilayah Pantai Timur. Tingkat pengangguran pada tahun 2018 adalah 2,61 persen. Sementara itu tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 70,57 Persen. Jumlah pencari kerja terdaftar di kabupaten Ogan Komering Ilir pada dinas tenaga kerja dan transigrasi kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2018 sebesar 1448 pekerja, proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada dinas sosia dan ketenagaan kerja berpendidikan terakhir SMA dan SMK. Sementara itu menurut sector lapangan

usaha, sector pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan sector yang memiliki jumlah pekerja terbanyak di tahun 2018 yaitu sebesar 233.792 pekerja.

Dari jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama merupakan pekerjaan, 90,788 orang yang berusaha sendiri, 83,090 orang yang berusaha di bantu buruh tidak tetap/buruh tak di bayar, 13,610 orang yang berusaha di bantu buruh tetap/ buruh di bayar, 111,865 orang yang buruh/karyawan/pegawai, 26,500 orang yang pekerja bebas, 76,403 orang yang pekerja keluarga/tak di bayar. Sedangkan jika kita lihat jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan tinggi yang di tamatkan. Di tamatan SD yang mencari kerja 130 orang, tamatan SMP 175 orang, tamatan SMA dan SMK 318 orang, tamatan diplomat I/II/III/ academi 155 orang dan tamatan yang universitas 182 orang.[21]

C. Kondisi sosial dan kesejahteraan

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan bidang penting dalam pembangunan sumber daya manusia karena sektor pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang selanjutnya akan meningkatkan produktifitas dan mengurangi tingkat ketergantungan penduduk.

[21] *Ibid*, h. 55

Pembangunan sumber daya manusia ini memang memegang peranan penting dalam kemajuan bangsa dan Negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia akan selalu turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan pendidikan di wilayah pantai timur di lihat dari jumlah data satuan pendidikan (sekolah) di kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan jenis pendidikan.

TABLE 2.6
JUMLAH FASILITAS SEKOLAH PERKECAMATAN DI WILAYAH PANTAI

NO	KECAMATAN	SD			SMP			SMA			SMK			TOTAL
		N	S	JL	N	S	JL	N	S	JL	N	S	JL	
1	Kec. Pangkalan lampam	18	2	20	5	4	9	1	0	1	0	0	0	30
2	Kec. Tulung selapan	30	3	33	10	3	13	1	2	3	1	0	1	50
3	Kec. Cengal	21	5	26	9	2	11	1	1	2	0	0	0	39
4	Kec.Air sugian	26	3	29	5	2	7	2	1	3	0	0	0	39
5	Kec. Sungai menang	23	0	23	8	4	12	1	1	2	1	0	1	38

SUMBER DATA : www.refrensi.data.kemdikbud.go,id

Di lihat dari table 1.3 data di atas berdasarkan jumlah pendidikan yang ada di wilayah Pantai Timur. Jumah semua jenjang pendidikan pada semua jenjang pendidikan di wiayah Pantai Timur sudah cukup memadai, pada tahun 2018 di bawah dinas pendidikan kabupaten Ogan Komering Iir di wilayah Pantai Timur terdapat 131 SD sederajat yang terdiri atas 118 sekolah negeri dan 13 sekolah Swasta, untuk SMP sederajat 37 Sekolah Negeri, 15 sekolah Swasta, untuk SMA sederajat ada 6 sekoah negeri, 5 Sekolah Swasta, dan kemudian terdapat 2 SMK Negeri.[22]

2. Kesehatan

Salah satu peranan pemerintah dalam pembangunan kesehatan adalah menyediakan sarana kesehatan yang dapat di jangkau oleh masyarakat luas, pada tahun 2018 penyediaan sarana kesehatan di Kabupaten OKI hanya terdapat 1 rumah sakit yang keberadaanya di kecamatan kayuagung yang merupakan di ibu kotanya, kemudian untuk rumah sakit bersalin ada 3 pada tahun 2014 yaitu 2 di Kec.Kayuagung, 1 di Kec.lempuing dan pada tahun 2018 berkurang menjadi 1 yang keberadaanya di Kec.Kayuagung saja. kemudian ada 22 poliklinik, 42 puskesmas dan 20 apotik. Inilah merupakan sarana kesehatan yang di sediakan oleh pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian di wilayah Pantai Timur jika terjadi pemekaran dari segi sarana dan prasaran kesehatan yang tersedia 3 poliklinik, 8 puskesmas, 68 poskesdesdan 3 apotek untuk masyarakat

[22] *Ibid*, h, 79

membeli obat atau bahan parmasi yang butuhkannya, untuk rumah sakit umum, rumah sakit khusus dan rumah sakit bersalin di wilayah Pantai Timur belum memiliki, jika masyarakat membutuhkan pengobatan, pemeriksaan biasanya langsung mengunjungi ke puskesmas ,klinik kesehatan atau ke poskesdes yang terdekat.[23]

3. Agama

Jumah fasiitas peribadaan di wilayah Pantai Timur Ogan Komering Ilir tahun 2018 terdapat sebanyak 551 buah. Fasilitas peribadaan di wilayah Pantai Timur masjid berjumlah 298, mushola 251 dan 2 gereja. Hal ini yang merupakan di lima kecamatan di cangkupan wilayah Pantai Timur yaitu

1. Kec.tulung selapan terdapat 40 masjid dan 14 mushola
2. Kec. Cengal terdapat sebanyak 57 masjid, 40 mushola dan 2 gereja
3. Kec.Pangkalan lampam terdapat sebanyak 50 masjid dan 17 mushola
4. Kec. Air sugian terdapat sebanyak 92 masjid dan 138 mushola.
5. Kec. Sungai menang terdapat sebanyak 59 masjid dan 42 mushola

Dari banyaknya jumlah tempat fasilitas peribadatan tentu akan ada jumlah penganut agama tersebut hal ini merupakan di wilayah Pantai Timur jumlah penganut agama yaitu :

[23] *Ibid*, h, 106

1. Kec. Tulung selapan, 38,011 Islam, 7 Protestan, 3 Katolik, dan 4 Hindu.
2. Kec. Cengal, 31,461 Islam, 69 Protestan, 2 Katolik, 8 Hindu, dan 1 Budha.
3. Kec. Pangkalan lampam, 18,995 Islam, dan 2 Protestan.
4. Kec. Air sugian, 30,066 Islam. 307 protestan, 71 Katolik, dan 15 Hindu
5. Kec. Sungai menang, 22,428 Islam, 252 Protestan, 103 Katolik dan 143 Hindu.[24]

D. Sejarah perjuangan pemekaran Pantai Timur

Sejarah merupakan dasar pondasi ataupun tiang dari berbagai hal yang menunjang segala jenis pengetahuan, berbicara sejarah banyak yang menyatakan bahwa sama hal nya membicarakan asal usul, kejadian, peristiwa yang memang benar benar terjadi di masa lampau. Hari ini peneliti juga ingin membicarakan tentang sejarah yang di mana suatu peristiwa yang benar benar terjadi dan di ketahui oleh peneli kemudian peneliti memberanikan diri untuk mencoba menulis dan mengurai tentang sejarah perjuangan pemekaran Pantai Timur yang peneliti ketahui.

Perjuangan pemekaran pantai timur untuk membentuk kabupaten baru ternyata banyak menguras tenaga, pikiran dan waktu untuk dapat mencapai cita-cita tersebut. Banyak yang sudah di lakukan untuk dapat mewujudkan cita-cita ini, bahkan banyak juga yang di libakan seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda,

[24] *Ibid*, h, 123

politisi, ormas, legislatif, eksekutif yang di pemerintahan, sekalipun masyarakat juga ikut terlibat dalam memperjuangkan pemekaran Pantai Timur.

Perjalanan pemekaran kabupaten Pantai Timur ini sudah berjalan selama 10 tahun lebih hingga tuntutan atas usulan pemekaran wilayah Pantai Timur pada tahun 2010 baru di terima di DPRD OKI dan di paripurnakan. Pada masa ini, pasang surut perjuangan. Beberapa kali sudah berubah wadah perjuangan hingga kepengurusannya juga terus berganti ganti, dua kali sudah melewatkan kesempatan emas, tiga kali penelitian daerah yang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), UNPAD Bandung dan BALITBANG DEPDAGRI. Kendala-kendala terbesar banyak di rasakan mulai berbagai macam seperti yang bergerak aktif partisipasi dalam memperjuangkan pemekaran Pantai Timur ini sedikit walaupun banyak jumlah anggota yang ikut partisipasi, hingga pada minimnya biaya untuk membiayai pergerakan, konflik internal yang membuat terpecah pecah hingga membuat persatuan menjadi retak dan lain-lain.

Perjuangan ini sejak Agustus 1999 masyarakat di wilayah Pantai Timur tehah nerintis pembentukan kabupaten baru yang meliputi 5 kecamatan yaitu kecamatan Tulung selapan, Cengal, Air Sungian, Sungai Menang dan Pampangan. Melalui kepanitiaan telah di lakukan dengar pendapat dan pada Tanggal 11 Januari 2000 dalam rapat umum yang di hadiri oleh partai-partai politik , organisasi massa, organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok remaja masjid, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama dan

pendukung-pendukung lainnya yang bertempat di kecamatan tulung selapan telah di proleh kesepakatan dan niat yang kuat untuk segera mewujudkan keinginan untu membentuk kabupaten baru.

Hal ini berawal dari diskusi kecil-kecilan yang lakukan beberapa orang mahasiswa yang keluar ide yang menginginkan pembentukan kabupaten baru. Awalnya ini menjadi pro kontra tetapi seiring dengan berjalannya waktu masyarakat itu sendiri mendukung untuk pemekaran wilayah Pantai Timur.

Berbica tentang sejarah tentang diskursus terkait proses pemekaran di wilayah Pantai Timur yang pasti banyak pebedaan pendapat ataupun mempunyai persepsi masing masing pasti ada tetapi hal ini peneliti tulis dari hasil kesimpulan dari beberapa tokoh yang di temui. Perjuangan pemekaran Pantai Timur Ini jika di hitung hingga sekarang sudah hampir 20 tahun lebih tetapi pemekaran Pantai Timur belum juga terjadi pemekaran. Perlu harus di ketahui walaupun perjuangan ini sudah lama tetapi dari hasil perjuangan pemekaran ini berkas nya sudah masuk ke pemerintah pusat bahkan sudah mendapatkan amanat presiden (AMPRES).

Pemekaran Pantai Timur ini belum terjadi pemekaran bukan berarti kurang persyaratan ataupun ada yang menghalang halangi pemekaran tetapi pemekaran pantai timur ini belum bisa di mekarkan karna ada kebijakan pemerintah yang memoratorium pemekaran di seluruh Indonesia . jadi pemekaran seluruh indnesia semuanya di tunda atau di tutup sementara. Jika di lihat calon kabupaten Pantai Timur ini sudah masuk ke dalam 65 RUU DOB yang berada di urutan yang ke lima sesuai dengan surat Presiden yang tunjukan ke DPR RI pada tanggal 27

Desember 2013. Hal ini kan tinggal selangkah lagi terwujud terbentuknya kabupaten Pantai Timur yang di cita citakan masyarakat Pantai Timur. Hanya saja terhambat adanya kebijakan moratorium dari pemerintah.

TABLE 2.7
DATA KEPUTUSAN PERSETUJUAN

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Persetujuan atas usul pemekaran wilayah kabupaten Ogan komering ilir, cakupan wilayah, nama calon kabupaten, calon ibu kota kabupaten baru, cakupan wilayah, dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pilkada pertama, penyerahan kekayaan daerah yang memiliki dan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang akan di gunakan oleh calon kabupaten baru	Keputusan dewan perwakilan rakyat kabupaten ogan komering ilir Nomor : 13 /DPRD-OKI/2010
2	Pesetujuan nama calon kabupaten dan lokasi calon ibu kota kabupaten pemekaran dari kabupaten ogan komering ilir	Keputusan Bupati OKI NOMOR : 106/KEP/I/2010
3	Persetujuan penyerahan sebagian kekayaan daerah yang dimiliki berupa barang bergerak, tidak bergerak, personil/PNS, dokumen dan hutang piutang kepada calon kabupaten pantai timur.	Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 107/KEP/I/2010
4	Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kepada calon kabupaten pantai timur	Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 108/KEP/I2010
5	Persetujuan pelepasan sebagian wilayah kabupaten ogan komering ilir yang menjadi cakupan wilayah calon kabupaten baru	Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 109/KEP/I/2010

6	Persetujuan pemberian dukungan dana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah calon kabupaten pantai timur.	Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 110/KEP/I/2010
7	Usul pemekaran ogan komering ilir yang di tunjukan kepada gubernur Sumatra selatan	Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 0235/I/2010
8	Penyampaian usulan rencana pemekaran wilayah pantai timur kabupaten ogan komering ilir yang di tunjukan kepada gubernur Sumatra selatan	Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 0002/I/2010
9	Penyampaian hasil pemuktahiran dta kajian pemekaran wilayah ogan komering ilir propinsi Sumatra selatan yang di tunjukan kepada gubenur Sumatra selatan.	Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 0134/I/2013
10	Usul pembentukan calon kabupaten pantai timur dancalon kabupaten kikim area provinsi Sumatra selatan	Surat Gubernur Sumatra Selatan ke ketua DPRD provinsi Sumatra Selatan NOMOR : 126/0873/I/2013
11	Persetujuan dan dukungan pemerntah provnsi Sumatra selatan terhadap pembentukan calon kabupaten pantai timur	Keputusan Gubernur Sumatra Selatan NOMOR : 381/KPTS/I/2013
12	Rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan kabupaten Pantai Timur masuk dalam Amanat Presiden (AMPRES)	Surat Presiden RI NOMOR : R-66/Pres/12/2013, tanggal 27 desember 2013 yang di tujukan ke ketua DPR-RI

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti akan mengurai tentang pemekaran wilayah Pantai Timur dari kabupaten Ogan Komering Ilir. Bab ini membahas mengenai diskursus politik dalam proses pemekaran dan penyebab wilayah pantai Timur belum bisa menjadi Kabupaten Baru. Untuk itu, lebih jelasnya di uraikan satu per satu sebagai berikut :

A. Diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai Timur.

Wacana pemekaran wilayah Pantai Timur memiliki cerita yang beragam, semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemekaran dan dalam hal ini merasa berjasa. Dengan ini, penulis berusaha mencari data-data dari sumber yang ada. Baik itu berupa tulisan-tulisan maupun saksi-saksi atau pelaku yang mengikuti proses pemekaran wilayah Pantai Timur, untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang mendekati dengan nilai-nilai obyektif yang mendekatkan dengan kebenaran sesuai fakta.

Berawal dari sebuah keprihatinan dan kepedulian sosial, tepatnya beberapa tahun lalu. Diskursus pemekaran wilayah Pantai Timur pada awalnya menuai pro dan kontra di masyarakat tetapi seiring berjalannya waktu diskursus tersebut di dukung oleh masyarakat karna memang pemekaran ini untuk suatu perubahan maupun dorongan untuk perkembangan daerah. Wacana pemekaran daerah di kawasan timur OKI jauh sebelum adanya pemekaran daerah sudah muncul tetapi itu sebuah kata-kata yang terlontarkan yang belum ada tindakan untuk bergerak.

Namun bergeraknya itu di saat timbul ide pemekaran dari DPRD OKI dengan menggunakan hak inisiatif dewan untuk memekaran kabupaten kemudian barulah ada pengajuan dari Ogan Ilir dan Pantai Timur untuk melakukan pemekaran. Di sinilah mulai bergejolak pemekaran di kabupaten OKI antara Ogan Ilir dan Pantai Timur.

Ide yang keluar dari mahasiswa dan pemuda melalui diskusi kecil-kecilan yang menginginkan suatu perubahan di daerannya kemudian ide ini di kembangkan dengan membuka forum masyarakat untuk mendapat dukungan dari yang lainnya. Selain itu mencari seseorang yang mengetahui dan menguasai agar ide ini bener-bener di perjuangkan.

> Ide Ini, sebenownye kamek istilahke murni dari sesame gelandangan, nongkrong2 malam malam bedalu ade leces ide ,mak manela kiteni jadi kabupaten, ay ujiku mak mane ini, urusan mekarke desa lagi sare, nah, kite nyakow wang kire kire mengetahui menguasai. makela kamek pindah ke rumah cudin karne cudin itu due beradek dengan sang dewi yang rusmin nuryadin , nah kebenowan kak sang dari bogor ,sempat rembukan, ai ini kamek ngompolke tande tangan pp maseh 129 tahun 2000 pp itu pokoknye maseh ngompolke tande tangan
>
> Ide Ini, sebenarnya kami istilakan murni dari sesame gelandangan, kumpul-kumpul malam-malam sampai larut malam, keluarla ide, bagaimana kita mekar jadi kabupaten, kata saya bagaimana urusan mekarkan desa lagi susah, nah, kita cari orang yang mengetahui dan menguasai. Pinda la ke rumah cudin karna cudin itu dua saudara dengan kak sang dewi dari bogor, sempat rembukan, ini

> kami kumpulkan tanda tangan sesuai PP 129 Tahun 2000 PP ini masih mengumpulkan tanda tangan.[25]

Langkah awal yang di lakukan yaitu membentuk panitia yang bertugas untuk menghimpun dukungan dalam bentuk tanda tangan dari masyarakat luas dan dukungan tokoh-tokoh di kecamatan yang di rencanakan akan tergabung. Ada lima kecamatan yang ikut terlibat dalam pembentukan kabupaten yaitu kecamatan Air Sugian, Pampangan, Tulung Selapan, Cengal dan Sungai Menang. Hasil pekerjaan panitia yang bertugas terkumpul keseluruhan dukungan dalam bentuk tanda tangan berjumlah 13.125 tanda tangan. Hal ini sudah cukup mewakili dari aspirasi masyarakat Pantai Timur. Kemudian membentuk wadah perjuangan dengan nama Panitia Pembentukan Kabupaten Pantai Rawa Gading yang di Ketuai oleh Drs. S. Rusmin Nuryadin dan Sekretaris Drs. Lamtasim Dasutra.

Aspirasi masyarakat kawasan timur OKI pada tanggal 1 Oktober 2001 sudah di sampaikan ke DPRD OKI yang di lampiri dengan 13.125 ribu tanda tangan dari unsur masyarakat dan tokoh-tokoh di kecamatan terlibat atas dukungan untuk membentuk kabupaten baru. Hal ini di dasari atas penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dari hasil kajian akademis pengembangan wilayah kabupaten OKI menghasilkan dua alternatif pemekaran kabupaten OKI yaitu alternatif pertama OKI di mekarkan menjadi dua kabupaten baru dan alternatif kedua OKI di mekarkan menjadi tiga kabupaten

[25] Ajar Etikana, Sekretaris Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI, Wawancara Tanggal 25 November 2019 Di Desa Sri Tanjung Mesuji Lampung.

baru. Jika di hubungkan dengan kriteria I dan kriteria II, kedua alternatif pemekaran tersebut di nyatakan lulus bersyarat untuk kriteria I dan di nyatakan lulus untuk kriteria II.[26]

Aspirasi masyarakat atas usul pemekaran kabupaten telah di sampaikan tetapi tidak ada respon serius atas usulan tersebut. Jelang beberapa bulan atas usulan masyarakat tentang pemekaran di kawasan timur OKI masih belum ada tanggapan atau kejelasan atas usulan masyarakat tersebut. sehingga Panitia Pembentukan Kabupaten Pantai Rawa Gading timbul pemikiran untuk mempertanyakan tindak lanjutan atas usulan tersebut.

> Sebenarnya itu bukan dak katek tanggapan ade tanggapan respon cendrung idak di press, karne itu mereka ade kepentingan memekarkan OI. Jadi mereka bukan malah mempokuskan pemekaran Pantai Timur tapi mempokuskan pemekaran Ogan Ilir untuk di jadikan 2 opsi. aku tau persis ketue tim pansus saat itu Ir turmudi dari praksi PKB yang berasal dari Air sujian ,sebenarnye pak turmudi pada saat itu die di tunjuk menjadi ketua pansus pemekaran OKI, posisinya pada saat itu serba sulit di saat die pengen pemekaran tapi die di tekan untuk opsi pertame , jadi pak turmudi dengan secara tegas die mengedepankan hasil kajian dari STPDN pada saat itu jadi die dak secare otodidak.[27]

Hasil kajian STPDN di rekomendasikan ke DPRD OKI kemudian DPRD la yang menentukan opsi mana yang harus di ambil setelah melihat ada 2 opsi untuk di mekarkan pada akhirnya DPRD OKI memilih opsi 1 yaitu memekarkan

[26] Arsip sekretaris Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT_OKI) Ogan Komering Ilir wilayah Pantai Timur.
[27] Hamka Yuda, Tokoh masyarakat di kecamatan Pangkalan Lampam, Wawancara pada Tanggal 02 Juli 2020, di Jejawi OKI

menjadi 2 kabupaten saja ialah Ogan Ilir dan OKI kemudian Pantai timur masih termasuk dari bagian OKI. karena Pantai Timur masih di anggap belum layak untuk di mekarkan hal ini juga merupakan keputusan akhir STPDN. Namun keputusan yang di ambil ini merupakan keputusan yang merugikan masyarakat Pantai Timur yang pada dasarnya mengingikan pemekaran kabupaten.

> hasilnya pun semuanya itu lulus bersyarat temasok 2 itu, karne memang insfrastruktur pembangunan segale mecam kite kalah, Di kebijakan politik sebenarnye pada saat itu waktu itu pak H fikri jadi wakil ketua. Pantai timur dan OI banyak kite kalah 1 kalah pendanaan, 2 kalah kebijakan politik kite dak katek yang besak di situ.[28]

Jika melihat kondisi di OKI sendiri memang sedang bergejolak untuk melakukan pemekaran antara Ogan Ilir dan Pantai Timur. Namun posisi Pantai Timur saat itu lemah di DPRD OKI walaupun ada H. Fikri sebagai wakil DPRD OKI sekaligus mewakili masyarakat Pantai Timur juga belum memiliki kekuatan politik DI DPRD OKI. di karnakan Ogan Ilir juga kuat untuk melakukan pemekaran. Selain itu, pemekaran Ogan Ilir sendiri di pelopori oleh Mawardi Yahya selaku ketua DPRD OKI, jadi Ogan Ilir sendiri mempunyai kekuatan untuk memisahkan diri dari OKI. Selain mempunyai pendanaan juga mempunyai kekuatan untuk menentukan kebijakan Politik di DPRD OKI. di sisi lain Mawardi Yahya lebih mempokuskan pemekaran Ogan Ilir dari pada Pantai Timur.

[28] Ibid,

Melihat keadaan ini, mendengar keputusan DPRD OKI atas kebijakan yang di ambil dengan memekarkan 2 kabupaten tentu membuat masyarakat Pantai Timur kecewa atas keputusan tersebut

> *.nah makenye salah satunye kite menggerakkan masyarakat bahwa ini sudah mendesak dan harus kita inikan kita buktikan dengan dewan pemerintah bahwa keberadaan kite ini ade dan nyate memang waktu itu*.[29]

Karna hal ini sudah mendesak aksi nyata dilakukan merupakan suatu bentuk penolakan keputusan DPRD OKI tersebut. Atas kekecewaan masyarakat Pantai Timur akhirnya melakukan aksi besar-besaran di kabupaten OKI untuk mendesak DPRD dan Pemkab OKI. Pada tanggal 26 september 2002. Dengan membuat wadah perjuangan baru yaitu Forum Perjuangan Masyarakat Pembentukan Kabupaten Pantai Timur yang dimana jajaran kepengurusannya berdasarkan perkecamatan yaitu pampangan, tulung selapan, cengal sungai menang dan air sugian. Untuk menuntut kabupaten OKI di mekarkan menjadi tiga kabupaten.

Aksi massa di lakukan dengan mendatangi DPRD dan Pemkab OKI, rombongan masyarakat pantai timur sekitar 800 orang dari kecamatan Tulung selapan, Pampangan, Cengal, Sungai menang, dan Air sugian datang ke pemerintah OKI. yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Pembentukan Kabupaten Pantai Timur OKI mendatangi DPRD dan Pemkab OKI di kayuagung. Kedatangan 800 warga ini di kordinir Rusmin nuryadin (Tulung selapan), Hamka (Pampangan), Heisen hower (Cengal) dan Alipir (Air

[29] ibid

sugian). Kedatangan rombongan warga Pantai Timur di gedung DPRD OKI di kayuagung sekitar pukul 11.00. saat itu anggota dewan sedang rapat paripurna dengan acara mendengarkan pemandangan umum anggota terhadap APBD OKI tahun 2002**.** Baru setelah rapat selesai, perwakilan dari 5 kecamatan diterima dari wakil DPRD OKI, Taufik hasdipa dan ketua tim pemekaran OKI, Ir Turmudi. Atas aspirasi warga Pantai Timur itu keduanya menyatakan akan membicarakan dengan pihak eksekutif.[30]

Setelah bertemu dengan DPRD OKI, kemudian melanjutkan mendatangi kantor Pemkab OKI melalui perwakilan warga 11 orang di pimpin Rusmin nuryadin. Mereka di terima Sesdakab OKI, Drs H Indra Rusdi di dampingin Kabag tata pemerintahan Drs Nazarudin Badar. Sekdakab OKI Menyampaikan keinginan yang sama agar OKI di mekarkan menjadi 3 kabupaten bukan hanya dua kabupaten seperti yang di usulkan ke pemerintah pusat itu.[31]

Melihat dari tanggapan tersebut di anggap tidak serius untuk memperjuangkan pemekaran Pantai Timur Karna mereka mempunyai kepentingan untuk memekarkan Ogan Ilir dan lebih mempokuskan pemekaran Ogan ilir dari pada Pantai Timur Kemudian melalui perwakilan dan pernyataan sikap yang di buat oleh wakil warga Pantai Timur yakni Rusmin Nuryadin, Hajar, Joni kusnadi, Yapan nanang, dan Hamka. mereka dengan tegas menolak rekomendasi DPRD OKI dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang akan

[30] Pantai Timur OKI Minta Jadi Kabupaten, Sripo, Jumat, 27 September 2002.
[31] *Ibid,*

memekarkan OKI menjadi 2 kabupaten yakni Ogan Ilir (OI) dan Ogan Komering Ilir (kabupaten induk).[32]

Tidak puas sampai situ saja kemudian masyarakat kawasan timur OKI melakukan aksi lagi di DPRD dan Pemprov Sumatra Selatan pada tanggal 15 Oktober 2002 dengan tujuan yang sama untuk menuntut kabupaten OKI di mekarkan menjadi tiga kabupaten.

GAMBAR 1.2 Foto, Aksi Massa ribuan masyarakat Pantai Timur tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Pembentukan Kabupaten Pantai Timur, mendatangi Gedung DPRD Sumsel, Selasa 15 Oktober 2002.

Adapun tuntutan Forum Perjuangan Masyarakat Pembentukan Kabupaten Pantai Timur ialah:

1. Kami menuntut pemekaran kabupaten OKI menjadi 3 kabupaten baru dan kami menolak dengan tegas pemekaran kabupaten OKI menjadi 2 kabupaten.

[32] Pantai Timur Menolak OKI menjadi Dua Kabupaten, Sumatra Ekspres, Jum'at, 27 September 2020.

2. Kami meminta Gubernur Sumsel untuk menarik kembali surat nomor : 136/42.38/IX/2002 tanggal 11 september 2002 perihal usulan pemekaran kabupaten OKI yang di tujukan kepada bapak menteri dalam negeri.
3. Kami meminta DPRD Sumsel untuk meninjau ulang rekomendasi pemekaran kabupaten OKI ke Gubernur dan memperjuangkan wilayah Pantai Timur untuk menjadi kabupaten.
4. Kami meminta kepada DPR RI untuk menunda pembahasan dan pengesahan pemekaran kabupaten ogan komering ilir hingga adanya peninjau kembali oleh DPRD OKI.

Hal ini yang lebih kuatnya masyarakat Pantai Timur untuk menyurakan aspirasinya di pemerintah Provinsi Sumsel karna di nilai kabupaten OKI tidak mendukung atas terbentuknya kabupaten baru di kawasan timur OKI karna di buktikan dengan keputusan yang sudah di ambil. Di tambah lagi Gubernur juga mendukung pemekaran Ogan ilir tanpa mempertimbangkan bahwasannya masyarakat Pantai Timur menolak Pemekan Ogan Ilir (OI).

Kemudian masyarakat Pantai Timur mendatangi sedikitnya 2000 orang ke Pemprov dan DPRD Sumsel. Ribuan warga ini sempat membuat Zamzami acmad (wakil ketua DPRD sumsel) yang ingin pulang di hadang massa dengan mobil BG 7 ini di dorong massa untuk kembali ke halaman parkir DPRD Sumsel. Kemudian Wakil ketua DPRD Sumsel, Drs H Zamzami akhmad, yang menerima perwakilan warga Pantai Timur diruang panitia musyawara (PANMUS), DPRD

menyampaikan bahwa dewan akan mempasilitasi dan menampung aspirasi warga untuk di sampaikan ke DPR RI sebagai pertimbangan dalam menetapkan pemekaran kabupaten OKI meskipun ini sudah menjadi keputusan Bupati dan DPRD OKI. tapi kami akan memfasilitasi dan menyampaikan aspirasi sebagai pertimbangan DPR RI.[33]

Setelah selesai pertemuan di ruang DPRD, warga Pantai Timur mendatangi kantor Gubernur Sumsel, sekitar pukul 13.00. mereka membentangkan spanduk dan berunjuk rasa untuk menuntut OKI di mekarkan menjadi 3 kabupaten. Kemudian perwakilan warga di terima oleh Pemprov Sumsel melalui perwakilan oleh kepala biro pemerintahan umum, H Kamil nuh, SH. Dalam pertemuan di jelaskan sebetulnya telah menerima usulan ini tapi usulan ini harus di ajukan ke DPRD dan Bupati OKI setelah itu baru di ajukan ke Gubernur, sementara ini aspirasi warga Pantai Timur di tampung. Jika usulan ini sudah sampai ke Gubernur melalui Bupati maka Pemprov Sumsel dan Pemerintah Pusat akan menurunkan Timnya untuk melihat kemungkinannya.[34] Juga di jelaskan bahwa wacana yang berkembang berdasarkan aspirasi warga Pantai Timur bisa di terima. Namun sayangnya usulan warga Pantai Timur terlambat sebab Gubernur Sumsel telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bahwa OKI hanya di mekarkan menjadi 2 kabupaten. Tetapi keputusan belum final karena Mendagri

[33] *Warga OKI Tuntut Pemekaran Tiga Kabupaten*, Sripo, Rabu 16 Oktober 2002.
[34] *Ribuan MPT Tuntut Pemekaran Wilayah Pantai Timur*, Sumatera Ekspres, Rabu 16 Oktober 2002.

belum menetapkan usulan tersebut. Usulan ini bisa di rubah tapi harus berdasarkan usulan Bupati OKI kepada Gubernur.[35]

Kemudian Pemprov yang menyarankan, untuk dapat merubah pemekaran OKI itu harus berdasarkan surat Bupati yang di ajukan ke gubernur untuk dapat menghentikan pemekaran OKI hal ini mendapatkan harapan bisa di rubah tetapi sebelumnya juga Bupati OKI menyetujui pemekaran OKI menjadi 2 kabupaten. apakah mungkin Bupati OKI akan menindak lanjuti dan membuatkan surat kepada Gubernur untuk merubah pemekaran OKI. sebelumnya juga Pemkab OKI tidak merespon pemekaran Pantai Timur. Aksi sebelumnya juga tidak mendapatkan hasil dari DPRD OKI untuk menindak lanjuti pemekaran OKI sehingga masyarakat Pantai Timur harus memperjuangkan nya dengan datang ke DPRD dan Pemprov Sumsel agar mendapatkan keadilan. Aksi ini di lakukan untuk,

> Mendesak Provinsi, supaye mekar , kite dulu mak ini yang penting secare nasional, tujuan sacare politik, jadi jangan bicara secare prosedur lagi, ngape lompat ke provinsi itukan pikiran logika secare umum, yang ini kan yang penteng seperti analogi persamaannye kayak kayak itu oy, walaupun nak nangkap ikan di sini, ribut sini, war wur war wur supaye ikannye di gereng, isuken di nasional, harus itu, di jadiken isu nasional.[36]

> Mendesak Pemprov Sumsel akan menindak lanjuti pemekaran, kita dulu seperti ini yang penting secara nasional, tujuan sacara politik, jadi jangan bicara sacara prosedur lagi, kenapa aksi ke Pemprov Sumsel itu kan pikiran logika secara umum. Aksi ini yang penting

[35] *Warga OKI Tuntut Pemekaran Tiga Kabupaten*, Sripo, Rabu 16 Oktober 2002.
[36] Rusmin Nuryadin, Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI) Wawancara, 12 November 2019, di Kayuagung.

> seperti analogi persamaan dengan kita manangkap ikan disini, ribut di sini, kesana kesini kesana sini, agak ikannya kita giring ke nasional. Isukan di nasional, harus itu, di jadikan isu nasional.

Hal ini di lakukan mendesak Pemprov Sumsel agar dapat di tindak lanjuti pemekaran kabupaten OKI, kemudian di sampaikan melalui aksi massa Atas ketidak setujuan masyarakat Pantai timur pemekaran OKI menjadi 2 kabupaten, aksi ini ternyata untuk menimbulkan isu di nasional walaupun hal ini secara prosedur harus mendesak OKI bukan mendesak Pemprov tetapi hal ini di lakukan agar mendapat perhatian dari nasional dengan menimbulkan isu atas penolakan pemekaran OKI menjadi 2 kabupaten. Hal ini agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dan di lakukan tinjau kembali pemekaran di kabupaten OKI sampai adanya peninjau kembali dari DPRD OKI. bahwasannya dengan keputusan DPRD dan Pemkab OKI masyarakat Pantai Timur di wilayah Timur OKI tidak setuju pemekaran OKI karna Hal ini tidak menguntungkan bagi masyarakat Pantai Timur. Aksi ini agar menjadi pertimbangan dari pemerintah pusat agar menunda pembahasan dan pengesahan pemekaran OGan Ilir (OI). tapi aksi ini hanya menjadi sorotan dan di beritakan di nasional saja dan untuk subtansi yang di perjuangkan tidak menjadi pertimbangan hingga pada akhirnya pemerintah pusat juga masih mengesahkan pemekaran OKI menjadi dua kabupaten. berdasarkan KEPPRES No. 37 tahun 2003 tentang pembentukan

pemerintah daerah di Indonesia terjadi di provinsi Sumatera Selatan yaitu kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).[37]

hingga kemudian mendengar informasi dari DPRD OKI Abdiyanto anggota DPRD OKI periode 2004-2009 bahwa ada salah satu anggota penelitian dari Sekolah Tinggi Ilmu Pengetahuan Negeri (STPDN) yang melakukan penelitian pemekaran OKI kemarin menyarankan agar Pantai Timur di bahas kembali. Sehingga pada tahun 2009 wilayah Pantai Timur sudah memiliki DPRD sendiri atau kalau pemilu itu daerah pilih (DAPIL) Pantai Timur karna ini untuk mempersiapkan jika memang akan terjadi pemekaran. Mendengar itu kini kembali semangat untuk menyatuhkan kembali para tokoh-tokoh wilayah Pantai Timur. kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan sehingga membuahkan kesimpulan merubah nama wadah perjuangan menjadi Forum Pergerakan Masyarakat Kawasan Timur OKI dengan di Ketuai oleh Haisen Hower dan sekretaris Paisal.[38]

Pada Fase ini perjuangan hampir tidak bergerak, karena tidak adanya dana sedangkan tokoh yang selama ini sebagai penyumbang terbesar H. Moyan Koncong menarik diri sebagai donator namun tetap melibatkan diri dalam perjuangan. Hal ini kemudian di evaluasi selama masa perjuangan dan mencari cara agar perjuangan ini harus tetap berjalan. Pola perjuangan di siasati dengan menggunakan pola koordinator dan permasalahan dana menggunakan yang istilahkan managemen mengemis/bantuan secara suka rela agar tetap berjalan

[37] http://www.kaboki.go.id , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Diakses Tanggal 10 Oktober 2019
[38] Ajar Etikana, Catatan Presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI) h. 7

perjuangan ini. Kemudian bergerak hal ini bersamaan dengan waktu dekat-dekat Pilkada dan Pilgub 2014.

Pada moment ini sangat di manfaatkan benar-benar, menyiapkan surat yang di tanda tangani oleh tokoh-tokoh yang di kecamatan yang terlibat. Tokoh tokoh di datangi secara langsung. Begitupun lobi-lobi di kabupaten OKI, di kecamatan, dan di desa-desa di kerjakan dalam waktu yang bersamaan. Dua bulan lebih perjuangan ini di kerjakan. Selain itu kerja sama dengan Guntur Malian memonitoring kunjungan bapak Gubernur Alek Noerdin ke daerah-daerah kecamatan. Saat kunjungan bapak Gubernur ke kecamatan Cengal, moment ini di manfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Pantai Timur pada acara dialog terbuka. Saat Gubernur kunjungan ke kecamatan Tulung selapan, ada semacam kesepakatan tertutup hal ini di ceritakan dalam tulisan Ajar etikana.[39]

Pada fase ini tidak bergerak begitu lama kemudian merubah wadah perjuangan lagi menjadi Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI, yang di singkat PPKT-OKI. Yang berbentuk Presedium di mana organisasi ini di pimpin oleh seorang Sekretaris Jendral kemudian terpilih menjadi sekretaris jendral Ajar Etikana.

> Ketuo presidium siapapun seluruh wang Pantai Timur seluruhnye ketuonyo presidium galo tapi yang berkuasa secara administrasi adalah sekjen nah itu saya lakukan , karne kito punye kesepakatan ketika di PDIP ngomonglah di PDIP, ketika di PPP ngomongla di

[39] Ibid. h. 8

> PPP, ketika di Golkar ngomongla di Golkar seolah olah akula ketuo.[40]

hal ini di lakukan untuk membagi peran untuk meloby di partai politik guna untuk mendapatkan dukungan untuk pemekaran Pantai Timur. Jadi elit lokal yang berasal dari Pantai Timur yang sudah bergabung di Partai Politik harus meloby Partainya masing masing. Hal ini di lakukan baik di kabupaten maupun di Provinsi, ini merupakan stategi untuk mendapat dukungan dari setiap partai. apalagi organisasi PPKT-OKI ini berbentuk presidium yang di pimpin oleh sekjen dan di bawahnya merupakan jajaran ketua presidium. Jadi setiap elit lokal maupun tokoh masyarakat itu bisa di sebut ketuo presidium. sementara itu, di gunakan untuk meloby meminta dukungan dengan mengatas namakan saya yang menjadi ketua presidium.

Pada tahun 2013 wadah perjuangan ini di Akta Notariskan bertepatan pada tanggal 22 Mei 2013 jam 19.00 WIB di hadapan H. Zulkifli Sitompul sarjana hukum notaris Palembang.

Struktur Kepengurusan Presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI

Ketua Umum : H.Azhari Effendi

Ketua : Drs. Rusmin Nuryadin : H. Ali Imbron, Se

: Drs. Gunatien Tp., M. Pd. : Ir. H.Syafri H. Nungtjik

: Mulseh: Ismail

Sekretaris Umum : Ir.Haisen Hower, Mp.

[40] Guntur Melian, Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI), Wawancara Pada 2 Maret 2020. Di Palembang

Sekretaris : Ir. Rasyid Burhan

: Ajar Etikana : Patriot

Bendahara Umum : H. Jamak Ani

: Benni Jamak

Dewan Penasehat Ppkt-Oki

Koordinator : H. Moyan Koncong

Anggota : H Pelli Yusuf

Kombes (PURN) H. Tanmalaka M. Ajad Tp., SKM., M.Pid Prof. Dr. Kodri Husein, MH

H. Kanang H, Nusi Eddy Salam, SH., MM Ir. Adamalik Rahman, M.Sc

Prof. Dr Chuzaimah D., M. Ls Parmansyah, SH. M.Si. Drs.Sartowi Lisin, MM

Prof. Dr. Hasa Nusi, MH Ahmad Romson, SH., LLM Drs. Autmil Burhan

Bastoni Baridun, BA. Hj. Lindawati Ali Konang, SEChairul Saleh Matdiah,

SH.Chairul Saleh, SH., MH M. Ilyas Panji Alam, SE., SH Drs.HAhmad Marzuki, SH.

Novri Haryanto, A.Md. Ir. H. Salmin Adi Helvia, M.BA DRS.Marzuki M. Nur

Agustiawa , SH., MM H. Jono H.Tandewi

H. Madrol H.Edi Suit H. Amri Karim

H. Effendi Koncong Darmiat,S.pd., S H. sujisto Jahri

DRS. H.lamtasim Jakbar Amirsyah,SH.

Kol.Edi Effendi Drs. Azhar Nawawi Askweni, S.pd

Drs. Burniat R. Kompol . Junaidi H.Ar. Fikri Juhan

Sairi Soldan, S.Ag. Drs. Saini Noer Juanda

Junaidi Maulana Ir. Turmudi Antivekos, SH.

Ahmad Ganti, H., Ir Astamidin, Drs Bunyamin, H.

Abuyassir Robbani, S.Ag. Supriadi H. Serin, SE Deri Siswadi

Djono Cikden, H. Guntur Malian, S. Ag., SH

Hamzah Bahna,S.Ag.,SH

Hatta Nirwana, H. Jeksen, Ir., MT Paisal, S.Si.

Salmin Adi Helpian, H.Ir., M. BA. Saidi Said

Bayumi, Ir.
Salman Saeser, H.
Subrata yapan, H. Drs
Suhendi Alwi, H
Suhirmin, SH.
Sukman (Katak), H
Syafarudin, SH.
Syarkowi Senen, H.
Zulkarnain Yahya, H
Indra Gunawan Maskot
Rosidi
Rozikin, H.
Saili, H.
Sabar Songok
Sudan
Sukiman
Mat Lasim
Abuana
Amirsyah, H.
Basyarudin
Ccaca, H.
Fahlepi(lepi)
Fery, S.Sos.
Hamka, Sp.
Hasyim, H.
Imron
Iswadi
Karim, H.
Karya
Kusmiran
Parman
Patriot
Ruslan
Rusli, H.
Sawiran
Sobri
Syaiful
Asmaja
Bastan Marjan, H.
Budi
Juanda, H.
Junaidi maulana
Bunyamin
Khoirul Huda
Kurnia
Lius
M. Muslih
Tion
Guntur
Ismail Hasan
Lindaya
Mat Dawek
Nusi
Sarkati
Bani, H.
Burniat zaini, H.
Ceng, H.
Dawar Eka Putra, H.
Djono Ahmad, H.
Eddy Karso, SE
Herwanto Zaini
Kadir, H.
Limtono
Marelo
Marsudin H. Soleh, H
Marusek, H
Mat Ganti
Muhtar Ciknung, S. Kom
Muhtaredi (Taredi)
Nazarudin, H.
Nurul, H.
Rusman Sejin
Resin
Toni Cik ali
Penri
Rela
Nuryid.

Sebenarnya pada tahun 2007 berkas atas usulan pemekaran Pantai Timur sudah masuk di DPRD OKI dan DPRD OKI membentuk pansus pemekaran Kabupaten OKI yang di Ketuai oleh Aksweni dan sekretaris Ir Turmudi, pemerintah OKI juga melakukan kajian daerah yang melibatkan UNPAD Bandung bahkan DPRD OKI sudah membahas di rapat paripurna pada hari senin 17 Maret 2008 dengan membuahkan keputusan DPRD OKI Nomor 2 Tahun 2008 tentang persetujuan atas usulan pemekaran Kabupaten OKI dengan membentuk kabupaten baru di wilayah OKI yang mencangkup lima kecamatan yaitu kecamatan Air Sugian, Cengal, Tulung Selapan, Sungai Menang, Pangkalan Lampam. Berhubung dengan adanya pergantian PP 129 Tahun 2000 berubah menjadi PP 78 Tahun 2007 sehingga Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI harus melengkapi ulang persyaratan yang merujuk kepada PP yang baru. yang di mana untuk dapat malakukan pengusulan pemekaran harus ada penelitian daerah dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di lihat persyararatan berdasarkan PP 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah sesuai dengan pasal 17 yakni :

a. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan ForumKomunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan.
b. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar

masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan.

c. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah.

d. Masing-masingbupati/walikota menyampaikan usulan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:

1. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
2. Hasil kajian daerah;
3. Peta wilayah calon kabupaten/kota; dan
4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusanbupati/ walikota

e. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah

f. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi.

g. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota.

h. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:

1. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
2. hasil kajian daerah;

3. peta wilayah calon kabupaten/kota;

4. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota; dan

5. Keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur.[41]

Namun pada pase ini kondisi masyarakat yang di luar kecamatan Tulung selapan sedang terpecah-pecah, arus yang anti tulung selapan sangat kuat sekali bahkan beberapa tokoh mempolitisir keadaan dengan mengangkat isu ibu kota yang seolah olah sudah pasti berada di Tulung Selapan. Padahal sebelumnya sama-sama sepakat untuk tidak membahas ibu kota dan nama kabupaten dan sepakat yang terpenting kita mekar dulu.

Pemerintah OKI melakukan penelitian daerah ulang bekerja sama dengan BALITBANG Departemen dalam negeri dengan merujuk kepada PP 78 Tahun 2007. Sementara itu, kesepakatan antara Pemda OKI dengan Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI) untuk menyingkat waktu penelitian daerah segerah di lakukan sedangkan kelengkapan-kelengkapan administrasi di kerjakan oleh PPKT-OKI menyusul dengan segera. Pekerjaan di lakukan untuk menyelesaikan meminta persetujuan BPD dari desa-desa di kecamatan yang terlibat dalam wilayah yang akan di mekarkan. Hampir satu tahun menyelesaikan tugas ini karena banyak pihak yang perlu di yakinkan. Selain itu untuk memperkuat data juga mengambil rekaman wawancara para tokoh di kecamatan yang terkait dalam bentuk video. Alhamdulillah dukungan BPD telah terkumpul

[41] PP 78 T ahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggab ungan Daerah

semua untuk di kecamatan Air Sugian di kerjakan Rosikin dan Nursyayid, di pangkalan lampam di kerjakan Reza, Pahlevi, Parman dan Feri, di Tulung Selapan, Cengal di kerjakan Ajar etikana. dan sungan menang di kerjakan Sucipto dan Ajar etikana.[42]

Setelah persetujuan BPD selesai, kemudian yang masih tersisa letak ibu kota dan nama kabupaten yang belum di putuskan. Sesuai dengan kesepakatan di serahkan dengan Pemerintah dan Peneliti. Persoalan ini di pasilitasi oleh Pemda OKI tempat di pilih paling netral yaitu kota Palembang di gedung DPRD Sumsel pada tanggal 6 Februari 2010 di bahas kemudian hasil foting rapat memutuskan letak ibu kota di kecamatan Tulung selapan dan nama kabupaten Pantai Timur.

Lengkaplah semua persyaratan kemudian langsung di serahkan kepada DPRD OKI hal ini di respon baik oleh DPRD OKI kemudian pada saat rapat paripurna membahas pemekaran wilayah Pantai Timur membuahkan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 13/DPRD-OKI/2010 tentang persetujuan atas usul pemekaran wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir, Cakupan Wilayah, nama calon kabupaten, calon ibu kota kabupaten baru, dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pilkada pertama, penyerahan kekayaan daerah yang memiliki dan penyerahan sarana dan prasarana perkantoran yang akan di gunakan oleh calon kabupaten baru.

[42] Ajar Etikana, catatan presidium pemekaran kawasan timur oki (PPKT-OKI) h. 12

Setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD OKI kemudian untuk masalah persetujuan Bupati OKI itu yang mengurusnya kasmir A kirom selain dari pemeritahan juga mewakili masyarakat Pantai Timur. Hal ini relevan dengan teori elit Pareto, yang di mana menurut Pareto lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elit) yang menurut dia berkuasa karena bias menggabungkan kekuasaan-kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting. hal ini akan mempercepat usulah pemekaran di tindak lanjuti. Bupati OKI Ishak Mekki juga mendukung penuh atas pemekaran wilayah Pantai Timur. Kemudian Bupati OKI juga menyetujui atas usul pemekaran wilayah pantai timur yang membuahkan keputusan Bupati kabupaten OKI Nomor : 106/KEP/I/2010 tentang persetujuan nama calon kabupaten dan lokasi calon ibu kota kabupaten pemekaran dari kabupaten Ogan Komering Ilir yang di ikuti keputusan yang lainnya seperti

DAFTAR 2.8 Data keputusan bupati ogan komering ilir

1	Persetujuan penyerahan sebagian kekayaan daerah yang dimiliki berupa barang bergerak, tidak bergerak, personil/PNS, dokumen dan hutang piutang kepada calon kabupaten pantai timur.	Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 107/KEP/I/2010
2	Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kepada calon kabupaten pantai timur	Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 108/KEP/I2010
3	Persetujuan pelepasan sebagian wilayah kabupaten ogan komering ilir yang menjadi cakupan wilayah calon kabupaten	Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir NOMOR : 109/KEP/I/2010

	baru	
4	Persetujuan pemberian dukungan dana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di daerah calon kabupaten pantai timur.	Keputusan Bupati Ogan kKomering Ilir NOMOR : 110/KEP/I/2010

Tidak lama berselang ishak mekki menyetujui atas usul pemekaran wilayah pantai timur kemudian pemerintah OKI menyampaikan berkas pemekaran calon kabupaten Pantai timur kepada Gubernur Sumsel dengan Nomor 0235/I/2010 atas usul pemekaran Ogan Komering Ilir yang di tunjukan kepada Gubernur Sumatra selatan yang di ikuti dengan surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 0002/I/2010 penyampaian usulan rencana pemekaran wilayah Pantai Timur kabupaten Ogan Komering Ilir yang di tunjukan kepada Gubernur Sumsel. Namun sebelumnya pada tanggal 25 Maret 2010 Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI) mengadakan pertemuan di hotel jaya karta daira di Palembang yang di hadiri keseluruhan elit politik Pantai Timur dan beberapa tokoh Sumatera selatan. membahas tentang pelimpahan berkas pemekaran calon kabupaten Pantai Timur ke Provinsi Sumsel. Mengingat sempitnya waktu karena terdesak akan di perpanjangnya kembali penundaan semetara (moratorium) pemekaran di Indonesia oleh presiden. Kesimpulan rapat yang di pimpin oleh Guntur Malian, bahwa berkas calon kabupaten Pantai Timur harus telah masuk ke Gubernur selambat-lambatnya Tanggal 31 maret 2010 dan di bentuk tim Loby PPKT-OKI yang terdiri dari 2 orang pengarah dan penasehat yaitu H. Abdi B,

Darmo, SH. MH. Dan Ir. H. Syaiful Islan serta delapan anggota terdiri dari H. ali Imbron Bayin, H AR Fikri H. Juhan, SH, Hj Lindawati Alikonang, SH, H. Zulfikri Simin, SH, Drs. H.Kasmir A. Kirom, MM, H. Chairil S. Madya, SH. MH Drs. S Rusmin Nuryadin dan Ajar Etikana.[43]

Pada tanggal 26 Maret 2010 pukul 15.00 Wib Presedium Pemekaran Kabupaten OKI Provinsi Sumatera selatan (Presedium Pemekaran Wilayah Pantai Timur) melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Sumsel bertempat di ruang rapat Komisi I DPRD Prov. Sumsel yang di hadiri Kasmir A.kirom asisten 1 Bupati OKI dan beberapa dari Presedium Pemekaran Kawasan Timur-OKI (PPKT-OKI) kemudian hasil audiensi membuahkan kesimpulan dan saran.

1. Bahwa Komisi I DPRD Prov. Sumsel memberikan apresiasi dan dukungan terhadap Pemekaran Wilayah Kabupaten OKI
2. Memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD Prov. Sumsel untuk meninjak lanjuti terhadap usul pemekaran
3. Kepada Presedium Pembentukan Pemekaran Kabupaten Pantai Timur Ogan Komering Ilir, di harapkan untuk segera melengkapi dokumen-dokumen yang menyangkut persyaratan administrasi sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007
4. Memintak kepada Presedium Pemekaran Kabupaten Pantai Timur Ogan Komering Ilir untuk segera melakukan Audiensi bersama Bupati dan Ketua

[43] Ibid. h. 12

DPRD Kabupaten OKI kepada Gubernur Sumatra Selatan dalam upaya mendapatkan persetujuan lebih lanjut.[44]

Melihat hasil kesimpulan dan saran dari pertemuan antara Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI dengan Komisi I DPRD Prov.Sumsel myang mendapat dukungan dari komisi I DPRD Prov Sumsel kemudian pada hari selasa tanggal 30 Maret 2010 PPKT-OKI mengadakan audiensi dengan Gubernur Sumsel di Palembang dengan menyampaikan hal yang sama yaitu usul untuk membentuk kabupaten pantai timur.

GAMBAR 2.1 Poto, Pertemuan audiensi dengan gubernur dalam penyampaian atas usul pemekaran wilayah Pantai Timur.

Di lihat dari pertemuan ini di sampaikan oleh presedim bahwasannya masyarakat Pantai Timur ingin membentuk kabupaten baru yaitu kabupaten pantai timur dengan tujuan untuk mengurangi rentan kendali pemerintahan OKI di karnakan dengan luas wilayanya. Sementara itu di sampaikan juga oleh gubernur

[44] Arsip sekretaris Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT_OKI) Ogan Komering Ilir wilayah Pantai Timur.

bahwasannya mendukung pemekaran pembentukan kabupaten pantai timur. Hal ini di buktikan dari hasil pertemuan audiensi dengan Gubernur dan di serah terima secara simbolis berkas usulan untuk pemekaran pantai timur kepada Gubernur yang di serahkan oleh H.moyan koncong.

Gambar 2.2 foto, serah simbolis berkas atas usulan pemekaran Pantai Timur kepada Gubernur Sumatra Selatan.

Setelah pertemuan audiensi dengan komisi 1 DPRD Prov dan Gubernur Sumsel semuanya setuju atas usul pemekaran Pantai Timur tetapi masih banyak persayaratan yang belum di lengkapi sehingga Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI) harus melengkapi ulang persyaratan tersebut agar memenuhi sesuai dengan PP 78 Tahun 2007. Agar atas usul pemekaran Pantai Timur ini cepat di proses di Pemerintah pusat.

Hasil data kajian pemekaran wilayah kabupaten ogan komering ilir provinsi Sumatra selatan di sampaikan pada acara ekspos pemuktahiran di hotel acacia Jakarta, 2-3 maret 2012. Dari penilaian tim peneliti di peroleh nilai untuk calon kabupaten Pantai Timur sebesar 385 dengan katagori mampu dan dapat di rekomendasikan untuk menjadi kabupaten baru. Hal ini dari hasil pemuktahiran data kajian pemekaran wilayah tersebut di sampaikan melalui surat Bupati OKI Nomor 0134/I/2013 yang di tunjukan kepada Gubernur Sumsel untuk dapat di tindak lanjuti.

Hingga pada senin tanggal 15 april 2013 komisi I DPRD Prov.Sumsel mengadakan rapat internal atas dasar surat Gubernur Nomor : 126/0873/I/2013 yang di tunjukan kepada ketua DPRD Prov.Sumsel untuk membahas atas usul pembentukan calon kabupaten Pantai Timur dan calon kabupaten Kikim area. Kemudian hasil rapat internal komisi I DPRD Prov.Sumsel menyetujui dan merekomendasikan untuk di bahas lebih lanjut permaslahan ini, untuk mendapatkan keputusan DPRD Prov.Sumsel. dengan kesimpulan komisi I DPRD Prov.Sumsel meminta kepada Pimpinan DPRD Prov.Sumsel untuk membahas lebih lanjut.

Sementara itu, hal ini atas rekomendasi komisi I DPRD Prov.Sumsel menyetujui pemekaran kedua calon kabupaten ini karena telah memenuhi persyaratan sesuai UU No 32 Tahun 2004 dan PP 78 Tahun 2007. Kemudian pada Rabu Tanggal 1 Mei 2013 dalam rapat paripurna DPRD Prov.Sumsel bahwa menyetujui pembentukan dua kabupaten baru dan akan di usulkan ke pemerintah

pusat. Kedua calon kabupaten tersebut yaitu Pantai Timur yang memekarkan diri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), dan Kikim Area dari kabupaten Lahat. Di tamba oleh ketua DPRD Prov.Sumsel, Wasista Bambang Utoyo menyatakan bahwa DPRD menyetujui pemekaran Kabupaten Pantai Timur dari Kabupaten OKI, serta memperbaharui dukungan persyaratan nilai nominal dana penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah sesuai persetujuan DPRD Nomor 21 Tahun 2010.[45]

GAMBAR 2.3 Foto, rapat paripurna dalam pembahasan atas usul pemekaran Pantai Timur dan Kikim Area

Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri juga oleh Gebernur Sumsel, Alex Noerdin menyampaikan untuk meminta presidium pembentukan dua kabupaten itu kompak kedepannya dan meminta masyarakat kompak dan bersatu, jangan ribut di internal, jangan dulu di ributkan siapa calon bupati, jangan demo dan percayalah dengan Pemprov Sumsel. Jadikan pengalaman yang ada sebagai

[45] Pantai Timur dan Kikim Area Di Usulkan Jadi Kabupaten, Sriwijaya Post, Kamis, 2 Mei 2013

pengalaman berharga seperti 4 warga yang meningggal akibat bentrok warga dengan aparat kepolisian yang meminta pemekaran Muratara dan contohlah seperti Pali yang dengan mulus jadi salah satu kabupaten baru.[46]

GAMBAR 2.4 Foto, ketua DPRD Sumsel, di dampingi Oleh Gubernur pada saat menandatangani berkas usul pemekaran Pantai Timur dan Kikim Area

Dalam hal ini DPRD Sumsel mandukung atas pemekaran Pantai Timur dan Kikim Area dan kemudian di susul oleh Gubernur Sumsel Mendukung pemekaran calon kabupaten Pantai Timur dengan di buktikan adanya keputusan Gubernur Nomor : 381/KPTS/I/2013 persetujuan dan dukungan pemerintah Provinsi Sumsel terhadap pembentukan calon kabupaten Pantai Timur.

Melihat besarnya dukungan dan persetujuan yang di peroleh untuk membentuk kabupaten Pantai Timur yang di berikan oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, kini memberi harapan dalam mewujudkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pantai Timur. Langkah awal pengusulan Kabupaten Pantai Timur Di DPR-RI berjalan sesuai harapan. DPR-RI

[46] Dua Wilayah Siap Dimekarkan, Tribun Sumsel, Kamis 2 Mei 2013.

memberikan dukungan kepada masyarakat Pantai Timur untuk membentuk kabupaten sendiri yang terpisah dari Kabupaten OKI. pada Kamis tanggal 24 Oktober 2013 DPR-RI menyetujui Pantai Timur di mekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai kabupaten baru di provinsi Sumatra selatan.[47] Dalam hal ini akan tercapai cita-cita masyarakat Pantai Timur untuk menjadi kabupaten baru.

Melalui proses yang panjang akhirnya cita-cita masyarakat Pantai Timur, kabupaten OKI akan segera terwujud. Sementara itu, perlu di ketahui usul pembentukan Kabupaten Pantai Timur sudah melalui mekanisme dan tahapan yang panjang, sesuai dengan PP 78 Tahun 2007. Selain itu atas dorongan aspirasi masyarakat telah di tindak lanjuti oleh Bupati OKI dengan mengusulkannya kepada Gubernur Sumsel dan telah di tindak lanjutkan Mentri Dalam Negeri (MENDAGRI). Kemudian rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Pantai Timur telah masuk dalam Amanat Presiden (AMPRES) sesuai surat Presiden RI Nomor R-66/Pres/12/2013 Tanggal 27 Desember 2013 yang di tunjukan ke Ketua DPR-RI. Dan masuk dalam 65 DOB yang akan di tetapkan.

Pada saat TIM DPOD Kemendagri melakukan Observasi untuk calon Kabupaten Pantai Timur berkunjung Di kecamatan Tulung selapan.

[47] Pantai Timur Jadi Kabupaten, Sriwijaya Post, Jum'at 25 Oktober 2013

GAMBAR 2.5 Foto, tim observasi Mendagri bersama perwakilan dari 5 kecamatan masyarakat Pantai Timur

Tujuannya kedatangan mereka untuk mengecek sejauh mana kelayakan calon Kabupaten Pantai Timur menjadi Kabupaten baru dari pecahan Kabupaten OKI. mulai dari potensi ekonomi, sosial budaya, batas-batas wilayah yang di sepakati dan kesatuan suara pemerintah dan masyarakat untuk membentuk Kabupaten Pantai Timur. Setelah tiba di calon Kabupaten Pantai Timur, Tim DPOD Kemendagri pun di sambut oleh masyarakat Pantai Timur melalui perwakilan dari lima kecamatan yaitu Pangkalan Lanpam, Tulung Selapan, Cengal, Air Sugian dan Sungai Menang.

> pada saat belum ampres keluar ade dari kemendagri akan melakukan observasi kelapangan hasil observasi itukan di tande tangani seluruh stakeholder keseluruh, kalu kabupaten bupati dan ketua DPRD provinsi gubernur dan nah bupati oki dak galak neken waktu itu jadi menimbulkan polemik itu cuman di paraf oleh sekda bupati dak galak neken dengan alasan karna akan di kaji ulang itu sampai

> adanya demo ke kabupaten sehinggah ada persetujuan dari DRPD kabupaten dan juge di propinsi juge ade kajian jadi hasil observasi itu di tande tangani sekda di paraf.

> Pada saat AMPRES belum keluar, ada dari kemendagri akan melakukan observasi kelapangan, hasil observasi itu di tanda tangani keseluruhan stakeholder. Kalau di Kabupaten Bupati dan Ketua DPRD OKI, di Provinsi Gubernur dan Ketua DPRD Prov, dan saat itu Bupati OKI tidak mau menandatangani akhirnya waktu itu menimbulkan polemik. Hanya di paraf oleh Sekda, Bupati tidak mau menanda tangani dengan alasan karna akan di kaji ulang sampai adanya Demo ke kabupaten sehinggah adanya persetujuan dari DPRD kabupaten dan juga ada kajian, jadi hasil observasinya itu di paraf oleh Sekda OKI.[48]

Pada masa pergantian kepemimpinan Bupati OKI Ishak Mekki ke Bupati yang baru ialah Iskandar, Di awal masa jabatan Iskandar terjadi polemik akibat Bupati OKI tidak mau menandatangani Hasil Observasi Lapangan dalam rangka pembentukan Kabupaten Pantai Timur sebagai pemekaran dari kabupaten OKI hal ini sebagai alasan Pemekaran Pantai Timur akan di lakukan kajian ulang walaupun rencana pemekaran tersebut sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang masih dalam pembahasan Kemendagri. tetapi hal ini harus di pelajari lagi terkait rencana pemekaran tersebut. Hal ini secara tidak langsung Bupati OKI yang baru tidak

[48]Abdiyanto, Anggota DPRD OKI, Wawancara Tanggal 16 Juli 2020. Di Palembang

mendukung atas pemekaran wilayah Pantai Timur. Selain itu, peneliti nilai memang pemekaran wilayah Pantai Timur akan berdampak besar bagi Kabupaten OKI secara kewilayaan jika terjadi pemekaran, Wilayah Pantai Timur lebih luas dari pada kabupaten induk. Banyak yang akan terjadi perubahan mulai dari tata kelola pemerintahan, birokrasi pelayanan, sumber pendapatan daerah dan lain-lain sebagainya itu akan berdampak bagi Kabupaten OKI.

> Di saat abdiyanto menggulingkan isu pemekaran dan di larang bupati. Lalu kami membuat pernyataan bahwa Pangkalan Lampam, Air Sugian, dan sebagian Tulung Selapan tidak mau di mekarkan, bupati ingin memenuhi janji-janji politiknya di sebagian wilayah Pantai timur dan bupati komitmen melakukan pembangunan secara bertahap dan bupati OKI membuat pernyataan bahwa saya tidak menyetujui pemekaran untuk OKI karna saya belum berbuat untuk Pangkalan lampam dan selapan darat, nanti dulu pemekaran terus habiskan 1 periode saya ini.[49]

Hal ini lah yang membuat tokoh Pantai Timur geram atas sikapnya yang tidak mendukung pemekaran padahal ini sudah di penghujung pemekaran Pantai Timur akan terwujud. Kemudian yang di nilai tidak mendukung pemekaran padahal sudah mendapat persetujuan dari Bupati OKI sebelumnya dan juga mendapat persetujuan dari gubernur. apalagi di tamba hasil penilaian tim peneliti di peroleh nilai calon Kanbupaten Pantai Timur 385 dengan katagori mampu dan

[49] Wawancara langsung dengan tim kemenangan iskandar di pilkada tahun 2014, Paisal, pada tanggal 17 Maret 2020

dapat di rekomendasikan untuk menjadi kabupaten baru dan untuk Kabupaten induk (Ogan Komering Ilir) di peroleh nilai sebesar 397 dengan katagori mampu.

Menanggapi sikap bupati OKI yang tidak mendukung atas tebentuknya kabupaten Pantai Timur.

GAMBAR 2.6 Foto, Aksi damai masyarakat Pantai Timur di Pemkab OKI

Kemudian Presedium Pemekaraan Kawasan Timur OKI menggelar Aksi Damai menuntut Bupati OKI agar tidak menghalang halangi pemekaran Pantai timur. Hal ini di lihat dari bupati OKI yang tidak menanda tangai Hasil Observasi lapangan dalam rangka pembentukan kabupaten Pantai Timur sebagai pemekaran kabupaten Ogan Komering Ilir.

Lalu kemudian Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI mengadakan rapat dengan DPRD OKI yang membuahkan hasil kesimpulan sebagai berikut

a. Masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kab.OKI atas tidak terlaksanannya Pemekaran Pantai Timur.
b. Anggota DPRD Kab.OKI akan mengadakan dialog dengan saudara bupati guna memperjuangkan aspirasi yang di sampaikan oleh masyarakat.
c. Anggota DPRD Kab. OKI yang hadir menyetujui akan di adakan proses hak angket terhadap bupati OKI karena di duga Bupati OKI membuat kebijakan yang bertentangan dengan peraturan-perundangan yang ada dan Bupati OKI membuat kebijakan yang meresahkan masyarakat Pantai Timur.
d. Anggota DPRD Kab. OKI yang mengusulkan Hak Angket.[50]

Hal inilah kemudian DPRD Kabupaten OKI mengusul kan Hak Angket. Ketua DPRD Kabupaten OKI, Yusuf Mekki didampingi Ketua Komisi III, H Ilyas Panji Alam menyebut, hak angket tersebut adalah salah satu hak yang dimiliki dewan seperti diatur dalam Undang-Undang (UU) guna menyelidiki sesuatu yang dinilai penting. Hak angket tersebut disampaikan karena Bupati OKI, Iskandar dianggap melakukan pelanggaran dengan tidak menyetujui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yakni Pantai Timur. Sudah ada 14

[50] Arsip Sekretaris Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI) Ogan Komering Ilir Wilaah Pantai Timur.

anggota DPRD OKI, dari enam fraksi yang setuju dibentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket.[51]

> Menurut teman teman di DPRD bahwa telah terjadi dan perlu di lakukan penyidikan karna telah di duga terjadi pelanggaran sehingga berhembuslah akan di bentuk Hak angket untuk melakukan penyelidiakan. Tapi yang namanya politikkan itu tadi tidak bisa di prediksi keputusan akhir semua berubah cuman PDI perjuangan yang tinggal sendiri semua praksi dengan segala alasan menyatakan belum perlu hak angket dilakukan pendekatan di panggil melalui komisi saja dulu bupati dengan alasan kelengkapan alat dewan yang ada tidak perlu hak angket tidak perlu pansus segale mecamla, sehingga secara aturan tidak memenuhi syarat untuk di ajukan[52]

Pada proses ini walaupun telah terjadi polemik seperti di sebutkan di atas, Hal ini tetap berlanjut hingga berkas usulan pemekaran wilayah Pantai Timur sampai ke DPR RI bahkan sudah mendapatkan AMPRES. Selain itu, Walaupun pemekaran Pantai Timur ada sedikit penolakan dari Bupati OKI dengan tidak menanda tangani hasil observasi lapangan dari Kemendagri tetapi sudah mendapatkan paraf dari Sekda OKI hal ini sudah cukup untuk mewakili dari Bupati OKI. melihat pada proses ini sebenarnya tahapan penolakan dan persetujuan itu sudah di lewati baik di kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

[51] Bupati OKI Di Nilai Melanggar Pantai Timur Mulai Memanas, Harian Umum Kabar Sumatra On Line, Rabu 7 Mei 2014.
[52] Abdiyanto, Anggota DPRD OKI, Wawancara Tanggal 16 Juli 2020. Di Palembang

Proses pemekaran Pantai Timur ini sebenarnya sudah lama bergulir mengingat bukan untuk kepentingan politik tetapi merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Pantai Timur. Karna luasnya wilayah kabupaten OKI walaupun setelah Ogan Ilir di mekarkan yang menyisahkan luas wilayah 19.023,47 Km^2 dengan 70% rawa. Hal ini masih membuat rentan kendali pemeritahan segi layanan jauh dari kata layak dan tidak berjalan maksimal, segi pembangunan secara insfrastruktur tidak merata. Jika di bayangkan bagaimana nasib masyarakat OKI di ujung pesisir timur sana yang aksesnya jauh dari ibu kota dan memakan biaya yang besar jika mau ke ibu kota Kayuagung. Dengan adanya pemekaran ini akan membuat tata kelolahan pemerintahan bisa di kendalikan.

Dalam upaya proses memperjuangkan pemekaran wilayah Pantai Timur banyak mengalami lika liku yang sangat panjang. Hal ini masih dalam kendali perjuangan, Mulai dari masuknya surat usulan yang di tanda tangani 13.125 orang di tahun 2001, penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri STPDN yang saat itu di beritakan kabupaten OKI bisa di mekarkarkan menjadi 3 kabupaten dan hasil akhir kepututusan DPRD OKI yang bisa memekarkan OKI menjadi 2 kabupaten saja, aksi massa tahun 2003 yang di lakukan masyarakat Pantai Timur di DPRD dan Pemkab OKI kemudian di lanjutkan aksi massa di DPRD dan Pemprov Sumsel yang tidak ada tindak lanjutannya, perubahan PP 129 tahun 2000 berganti menjadi PP 78 tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang membuat pejuang Pantai Timur

harus melengkapi ulang persyaratannya, penelitian kajian pemekaran yang di lakukan sudah 3 kali mulai dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan dalam Negeri (STPDN), kemudian penelitian UNPAD bandung dan terakhir penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan baru mendapatkan persetujuan dari DPRD OKI dan Bupati OKI atas usulah pemekaran di tahun 2010. Selain itu, sudah beberapa kali perubahan wadah perjuangan hingga pergantian kepengurusan dalam memperjuangkan pemekaran. Dalam upayanya ini elit lokal membagi perannya masing masih dari tahapan paling bawah sampai ke tingkat pusat. Seluruh elemen khusus dari Pantai Timur terus menjalin komunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Baik itu pejabat di pemerintahan, elit politik, partai politik, tokoh masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Hal ini senada dengan yang di katakan Pareto, menurutnya masyarakat terdiri dari 2 kelas: (1) lapisan atas, yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elit) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elit), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non-elit. elit yang memerintah, yang menurut dia berkuasa karena bias menggabungkan kekuasaan-kekuasaan dan kelicikan, yang dilihatnya sebagai hal yang sangat penting. Sedangkan elit yang tidak memerintah, elit mampu meraih kekuasaan dan kedudukan dengan dua cara, yaitu (1) kekuasaan atau kekerasaan fisik, dan (2) siasat dan strategi politik. Hal ini yang di lakukan oleh Presedium Pemekaran kawasan Timur-OKI (PPKT-OKI) dengan terus menjalin komunikasi dan kerjasama agar terjadi percepatan dalam pelaksanaan proses pemekaran. Memang pemekaran saat itu semangat bersatu

untuk kebutuhan bukan untuk kepentingan politik demi mencapai cita cita terbentuknya Kabupaten Pantai Timur. Namun pada proses ini tetap berlanjut hingga pada DPR-RI memutuskan untuk tidak mengesahkan 65 RUU DOB yang di ajukan ke parlemen. Hingga akhirnya di limpahkan kepada anggota DPR RI periode 2014-2019.

B. Penyebab Pemekaran Kabupaten Pantai Timur Belum Bisa Menjadi Kabupaten Baru

Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah lebih cendrung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik. hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan pemekaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Pemekaran yang pada dasarnya dari aspirasi masyarakat akan selalu ada elit poltik yang menunggangi untuk meraih kekuasaan. Isu isu pemekaran yang di gunakan untuk di jadikan jembatan mendapatkan kepercayaan masyarakat di pemilu agar di dukung dan mendapatkan kursi kekuasaan. Nyatanya pemekaran wilayah pantai timur ini hanya di jadikan alat elit politik untuk meraih kekuasaan. buktinya sampai sekarang pemekaran wilayah Pantai Timur belum bisa menjadi kabupaten baru. Padahal jika di hitung perjuangan pemekaran Pantai Timur ini sudah hampir lebih 20 tahun. Masyarakat Pantai Timur hanya jadi korban politik di setiap pemilu. Di umbar-umbar isu pemerakaran Pantai Timur agar mendapat simpati dari masyarakat Pantai Timur seolah olah dia lah yang akan memperjuangkan pemekaran tetapi setelah mendapat dukungan dan meraih kursi kekuasaan nyatanya pemekaran Pantai Timur masih saja belum mekar mana katanya mau memperjuangkan pemekaran sampai sekarang saja belum mekar. hal ini juga di ungkap oleh Pak Ajar Etikana sejatinya rakyatlah yang memperjuangkan pemekaran.

Pemekaran wilayah pantai timur ini sejatinya murni aspirasi rakyat yang tidak mempunyai kepentingan melainkan untuk masyarakat Pantai timur itu sendiri. Rasa ingin bersatu memperjuangkan pemekaran Pantai Timur memang suatu kebutuhan bagi wilayah Pantai Timur karna mengingat keadaan yang sangat memprihatinkan. Di lihat aksi massa di pemerintahan OKI dan pemerintahan Pemprov Sumsel masyarakat begitu semangat menyuarakan aspirasinya ribuan masyarakat berdatangan untuk menuntut pemekaran Pantai Timur dan bersatunya masyarakat Pantai Timur di lima kecamatan. hal ini menandakan bahwa ini memang murni pemekaran Pantai Timur ini dari rakyat karna memang sudah sepantasnya wilayah Pantai Timur ini di mekarkan. dengan luasnya kabupaten OKI ini membuat rentan kendali pemerintahan. Pembangunan tidak merata, pembangunan pun lebih cendrung itu di wilayah barat dari pada di wilayah timur OKI. apalagi di wilayah Timur OKI ini jarak nya jauh dari pemerintah OKI yang ber ibu kota Kayuagung, Untuk dapat menuju ke ibu kota Kayuagung mungkin menghabiskan Jarak kurang lebih 200 Km untuk menuju kesana.

Pemekaran Pantai Timur ini sebenarnya sudah mekar jika memang di perjuangkan tetapi hal ini memang tidak bisa kita pungkiri jika berbicara masalah kepentingan. Di sisi lain banyak yang berjuang tetapi yang benar-benar berjuang hanya segelintir orang yang aktif. Pada proses perjuangan pemekaran wilayah Pantai Timur ini pasti ada yang menghambat perjuangan sehingga terkendala.

> Salah satu kelemahannye ini sugjektif berdasarkan pengalaman, kito itu terkendalanyo dak jelasnye masa kerja presidium, tata kerja,

> Pertanggung jawaban kemudian progres-progres kegiatannye dak terstruktur kalo kito ingat dari, pertame kali itu pak Sang dewi, pak Haesen, pak Ajar terakhir pak Azhari ini juge dak jelas dalam artian dobrakan politik presidium seolah olah sunyi dak pule bedengungkan gerakannye.[53]

Tentunya dalam setiap pergantian presidium atau pemimpin kelompok pastinya mempunyai persoalannya nya tersendiri-sendiri. Di masa Sang Dewi, awal-awal mulai merintis sebuah perjuangan yang ingin mempersatukan para tokoh-tokoh masyarakat di kecamatan yang terlibat pastinya memiliki permasalahannya sendiri. Di masa Haesen, di suasana setelah bergejolak pemekaran Ogan Ilir dan Pantai Timur yang pada akhirnya Ogan Ilir di mekararkan. Di Masa Ajar, sedang terjadi perpecahan di tubuh internal sehingga mendapatkan kesulitan dalam mempersatukan para elite lokal. Kemudian di masa Azhari yang melanjutkan masa sebelumnya untuk memperkuat persatuan dalam memperjuangkan pemekaran Pantai Timur kembali. Tentunya ini di setiap masa kepemimpinan mempunyai kesulitan masing masing. Selain itu, dengan adanya kepemimpinan yang baru masyarakat berharap agar terwujudnya terbentuk kabupaten Pantai Timur. Tetapi sayangnya dalam perjalannya,

> terkendala dari pembiayaan ,terkendala dari waktu pak sang dewi banyak di bogor , Pak haesen waktu itu jadi dio waktu itu jadi ketue KPU jadi dak terlalu banyak pokus. pas ade pak ajar etikana die

[53] Deri Siswadi, Tokoh Masyarakat Di Kecamatan di Tulung Selapan, Wawancara pada 9 Juli 2020 di kayuagung.

> memang tinggal di cengal di bergeraknye tapi proses pendanaan terkendala, dan kite berharap pak azhari waktu itu jadi presidium karne di anggap wong yang punye akses ekonomi yang ini, ternyata apo gerakan politiknye banyak dak di dukung oleh elit lokal kito dewek ,karno ngapo karno waktu itu entah apo distras ado unsur ketidak percayaan atau ade ego politik.[54]

hal ini walupun ada unsur ketidak kepercayan atau ego politik tetapi pada proses perkembangannya ketika berkas usulan di proses di kabupaten maupun di provinsi Sumsel. para elite lokal saling berkomunikasi dengan sendirinya menyatuh kembali perjuangannya dengan perannya masing masing dalam memperjuangankan pemekaran Pantai Timur. Tentunya dalam perjuangan pastinya punya hambatan-hambatannya baik di internal maupun di eksternal.

Di internal, lebih jelasnya terjadi perpecahan di tubuh internal. elit lokal yang tidak sepemikiran dalam memperjuangkan pemekaran Pantai Timur. Di lihat pada saat saat pilkada tahun 2018 pertarungan antara putra daerah Pantai Timur yang saat itu ada tiga kandidat pasangan calon dan di antaranya 2 kandidat pasangan calon dari putra daerah Pantai Timur. hal ini menunjukan bahwa tidak bersatunya elit lokal dalam memperjuangkan pemekaran padahal kedua tokoh ini orang yang berpengaruh dan berperan penting dalam memperjuangkan pemekaran. Kemudian menjadi persaingan dalam pertarungan pilkada 2018 untuk memperebutkan kursi kekuasaan. Walaupun hal ini sudah melewati masa

[54] Deri Siswadi, Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Tulung Selapan, Wawancara Pada 9 Juli 2020 , Di Kayuagung.

memperjuangkan pemekaran Pantai Timur dan tinggal menunggu di bukanya moratorium tetapi dengan adanya persaingan pilkada ini peneliti maupun masyarakat melihat hal ini seolah olah memang dari sebelumnya sudah berseteru dari 2 tokoh ini. Jadi Melihat kondisi seperti ini pembentukan daerah otonomi baru jika ini sinyali muatan politis akan cendrung merugikan masyarakat. Di sisi lain jika hal ini terus terjadi walaupun bukan ranah pemilu ini akan terbuka lebar Perpecahan di tubuh internal, persatuan akan menjadi rapuh, kepercayaan antar sesama pengurus akan berkurang, pro kontra akan begitu kuat, perselisihan juga begitu karna tidak sepemikiran dalam memperjuangkan pemekaran Pantai Timur. Dengan adanya perpecahan di tubuh internal bukannya terjadi percepatan malahan terjadi perlambatan atas tujuan sebenarnya bahkan pemekaran otonomi daerah itu sendiri tidak akan terwujud. Pemekaran daerah yang di gembar-gemborkan untuk kemajuan daerah malahan jadi bumerang bagi daerah itu sendiri. Tujuan pembentukan daerah otonomi baru hanya akan menjadi sebuah hayalan semata yang tidak akan terbukti dengan kenyataannya atau gagal.

Di eksternal, Lebih jelasnya lagi terhambatnya pemekaran Pantai Timur ini ialah di pemerintahan OKI. karna lamanya pemerintah OKI merespon pemekaran Pantai Timur. Di Lihat dari mulai pengajuan atas usul pemekaran pada Tanggal 1 Oktober 2001 hingga pada tahun 2010 baru mendapatkan persetujuan atas usul pemekaran memang sebelumnya pada tahun 2008 juga mendapatkan persetujuan dari DPRD OKI tetapi hal itu terhambat karna adanya perubahan PP 129 Tahun 2000 berganti menjadi PP 78 Tahun 2007 sehingga membuat Presidium

Pemekaran Kawasan Timur-OKI harus melengkapi ulang persyaratan karna persyaratan sebelumnya tidak berlaku lagi, hingga pada tahun 2010 mendapatkan persetujuan lagi dari DPRD dan Pemkab OKI. dan terhambatnya lagi pemekaran Pantai Timur karna adanya kebijakan pemerintah yang memoratorium pemekaran daerah di seluruh Indonesia. Hal ini juga termasuk pemekaran wilayah Pantai Timur, kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang merugikan masyarakat Pantai Timur. Karna di lihat perjuangan yang begitu lama, banyak waktu yang di habiskan untuk memperjuangkan pemekaran. Begitu juga dana yang banyak di keluarkan, tenaga dan pikiran yang terkuras demi memperjuangkan pemekaran Pantai Timur'

Jadi wilayah pantai timur belum terjadi pemekaran bukan karna persyaratan yang belum lengkap tetapi dari kebijakan pemerintah yang memoratorium pemekaran sehingga dari 65 RUU DOB yang di ajukan ke perlemen DPR RI memutuskan untuk tidak di sahkan. Termasuk calon Kabupaten Pantai timur yang belum bisa di mekarkan itu karna terhambat oleh kebijakan pemerintah. Padahal jalan pemekaran inilah untuk memberi solusi bagi wilayah Pantai Timur, dengan pemekaran masyarakat Pantai Timur lebih dekat dengan pelayanan publik, percepatan pembangunan insfastruktur dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebenarnya pemerintah sudah pernah mengeluarkan kebijakan Moratorium pemekaran di seluruh indonesia. Di akhir tahun 2006, keputusan sidang paripurna DPR RI yang melakukan moratorium terhadap pemekaran. Hal ini atas usulan

presiden SBY sendiri pada saat sidang DPD di bulan agustus 2006 mengusulkan untuk menghentikan semetara proses pemekaran yang di anggap telah menjadi beban pemerintah.[55] Hal ini di karnakan masih banyaknya daerah yang di mekarkan mengalami kegagalan dan tidak memenuhi tujuan pemekaran itu sendiri. Konflik daerah, juga terjadi karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah pusat terkait moratorium pemekaran yang pada tahun 2009 di lakukan. Namun tahun 2012 kembali kran pemekaran daerah di buka. Salah satu resminya Kalimantan utara menjadi provinsi ke-34 indonesia.[56]

Terbukanya kran pemekaran daerah hal ini telah membuka lebar kembali untuk pemekarn wilayah yang ada di Indonesia kemudian di Sumatra Selatan juga merencanakan untuk pemekaran wilayah di antaranya kabupaten PALI pemekaran dari kabupaten Muara Enim di tahun 2012 lalu kemudian di susul MURATARA pemekaran dari kabupaten Musi Rawas di tahun 2013. Sedangkan di wilayah lain di Sumatra Selatan sedang bergejolak untuk melakukan pemekaran juga ialah wilayah Pantai Timur yang ingin mekar dari Kabupaten OKI dan Kikim Area dari Kabupaten Lahat. 2 calon Kabupaten baru ini sudah dalam proses dan juga sudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

[55] Andik Wahyu Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia : Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2 juni 2013, h, 289

[56] Kalimantan Utara Berdiri Pada Tanggal 25 Oktober 2012 Dan Resmi Menjadi Propinsi Setelah Lepas Dari Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur.

Bahkan berkas usulan sudah masuk ke Mendagri. Tinggal beberapa langkah lagi akan terwujud menjadi kabupaten baru.

Dalam prosesnya sudah melalui tahapan dan mekanisme yang panjang sesuai dengan PP 78 Tahun 2007. Wilyah Pantai Timur dari kabupaten OKI selangkah lagi menjadi kabupaten baru karna sudah membentuk rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Pantai Timur. Kemudian telah masuk dalam Amanat Presiden (AMPRES) sesuai surat Presiden RI Nomor R-66/Pres/12/2013 Tanggal 27 Desember 2013 yang di tunjukan ke Ketua DPR-RI. Hal ini sesungguhnya sudah masuk di dalam agenda rapat DPR RI yang di rencanakan Calon Kabupaten Pantai Timur akan di paripurnakan pada tahun 2014. Saat ini Calon Kabupaten Pantai Timur berada pada urutan ke lima untuk di bahas dan di tetapkan Undang-undang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Namun untuk pembahasan RUU kabupaten Pantai Timur tidak terlaksana terjadi penundaan karena pada saat memasuki sidang paripurna DPR RI dengan penetapan agenda RUU Daerah Otonomi Daerah (DOB) pada senin 29 September 2014 di Jakarta berlangsung alot. Rapat paripurna akhirnya memutuskan untuk di lakukan lobi antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Pusat. Sementara itu, perwakilan sejumlah pemohon DOB bersikeras menolak penundaan pengesahan RUU DOB dan hingga di limpahkan kepada anggota DPR RI periode 2014-

2019.[57] Setelah ricuhnya kondisi rapat paripurna karena banyak pengunjung berteriak meminta di sahkannya RUU DOB paling tidak 21 daerah, hingga para anggota dewan kembali berdiskusi. “wakil ketua komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja mengungkapkan, sebenarnya ada 21 DOB yang dinilai pemerintah layak di mekarkan, namun menghindari kecemburuan antara daerah, akhirnya di sepakati RUU tersebur tidak di lanjutkan.[58] Pembahasan juga tidak bisa di paksakan mengingat terdapat perbedaan persyaratan antara UU pemerintah daerah yang baru, UU pemerintahan yang lama di maksudkan adalah UU No 32 tahun 2014, lalu terjadi perubahan menjadi UU No 23 Tahun 2014. Mengingat Perpu No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah baru saja di sah kan menjadi Undang-undang.[59]

Pada Proses pelaksanaan pemekaran daerah ini akhirnya di hentikan oleh pemerintah dengan mengambil kebijakan melakukan moratorium pemekaran daerah pada tahun 2014. Hal ini di masa peralihan kepeminpinan presiden sosilo bambang yudhoyono (SBY) ke Presiden Jokowi Dodo. Sebagaimana di sebutkan oleh Pareto yang menurutnya di akibatkan karena terjadi perubahan dalam sifat psikologi berbagai kelompok elite yang berbeda, karena itu elite harus

[57] http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2014/09/29/298967/penetapan-ruu--dob-kembali-mundur. Penetapan RUU DOB kembali mundur , Di akses pada tanggal 15 maret 2020.
[58] Kurniawan Agung Wicaksono, Http://kabar24.bisnis.com/read/20140929/15/260139/ruu-dob-berpotensi-dilimpahkan-ke-pemerintah-baru, RUU DOB Berpotensi Dilimpahkan ke pemerintah baru, 29 september 2014 di akses pada 25 maret 2020.
[59] http://radarpena.com/read/2015/02/06/15478/5/2/65-DOB-dibahas-Ulang#sthash.SY3jHaQC.dpuf, 65 DOB di bahas ulang, radar pena.com, 6 Februari 2015, di akses pada 25 Maret 2020.

memerintah dengan melakukan penyerapan dengan mengelabui masa dan memperalatnya. Serta mosca melihat pergantian elite berkaitan dengan bagaimana kecakapan elite dalam menjalankan kontol politik.[60] Memang jika kita lihat sebelum kebijakan moratorium, perseteruan untuk memperjuangkan pemekaran daerah ini di waktu bersamaan di akhir-akhir masa jabatan baik DPR RI Maupun Presiden. Peran besar di lakukan elit yang di pemerintahan dalam memperjuangkan pemekaran sangat mempengaruhi terjadinya percepatan pemekaran daerah tetapi sayangnya hal ini bersamaan di masa akhir-akhir jabatan sehingga di nilai kurang tepat dalam menentukan kebijakan pemekaran daerah. Hal ini la yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengesahan 65 DOB yang telah di ajukan ke DPR RI sampai akhirnya pembahasan tertunda dan akan di lanjutkan kepada DPR RI selanjutnya. Kemudian sampai hari ini pembahasan masih belum di bahas di karnakan sampai saat ini masih belum di buka kran moratorium pemekaran.

[60] Welhelmina Selfina Bali, Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar NTT, Politika, vol. 6, No.2, Oktober 2015

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan dan di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa diskursus politik dalam proses pemekaran wilayah Pantai timur yang fokus pada proses pemekaran dan penyebab belum bisa di jadikan kabupaten baru. maka dapat, sedikitnya ada dua kesimpulan yang di tarik sebagai berikut :

1. Pemekaran wilayah Pantai Timur pada awalnya berasal dari aspirasi masyarakat itu sendiri. yang menginginkan adanya perubahan di suatu daerah dimulai dari pembangunan yang merata, pelayanan yang lebih baik dari pemerintah agar terjadi perubahan yang signifikan. melalui pemekaran wilayah Pantai Timur di harapkan akan membawa perubahan signifikan dari segala lini aspek bukan hanya dari segi isprastruktur namun juga seluruh aspek pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, administrasi, birokrasi, lapangan kerja dan lain-lain sebagainya. Kemudian pemekaran wilayah Pantai Timur ini bukan saja muncul dari masyarakat itu sendiri. selain itu, kepentingan politik juga ikut menyertai aspirasi tersebut selain untuk mencapai tujuan sebenarnya juga mencapai untuk mendapatkan suatu jabatan dan kekuasaan baru di institusi pemerinahan.
2. Proses pemekaran di wilayah Pantai Timur ternyata banyak melibatkan orang seperti tokoh masyarakat, eksekutif, legislatif, partai politik, organisasi masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. pada proses pemekaran ini yang di

mulai dari masuknya berkas atas usul pemekaran hingga keluarnya amanat presiden dan berakhir moratorium pemekaran hingga saat ini ternyata mengalami proses yang panjang hingga kurang lebih 20 tahun. namun sampai sekarang masih saja wilayah Pantai Timur belum bisa menjadi kabupaten baru. Jika di amati peran elit lokal dalam proses pemekaran terlihat dari mulainya meminta dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), DPRD dan pemerintah di tingkat lokal sampai ke tingkat pusat.

B. Kritik dan Saran

Pertama , dalam memperjuangkan pemekaran wilayah Pantai timur terjadi perbedaan pendapat/pemikiran dalam memperjuangkan pemekaran padahal di ketahui sama-sama memperjuangkan pemekaran, hal ini mungkin terjadi kesalahpaham sehingga di salah artikan yang menyebabkan beda pemikiran dalam memperjuangkan pemekaran. hal ini sangat di sayangkan akibatnya terjadi perpecahan di internal. Untuk memperjuangkan pemekaran ini seharusnya mempunyai visi misi yang sama agar terwujudkan cita-cita tersebut. Bersatu menjadi sumber kekuatan, selalu terbuka menjadi kepercayaan komitmen berjuang menjadi keberhasilan pemekaran daerah.

Kedua, tidak mempunyai kekuatan politik dalam memperjuangkan pemekaran akibatnya banyak memiliki hambatan dan kendala dalam memperjuangkan pemekaran. Pemekaran merupakan hasil dari lobi politik sehingga terjadi percepatan pemekaran. Hal inilah yang tidak di miliki oleh

Presedium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI). jika mempunyai kekuatan politik mungkin sudah lama wilayah Pantai Timur menjadi kabupaten, nyatanya sampai sekarang belum bisa menjadi kabupaten. Jadi kekuatan politik inilah yang akan mendorong terjadinya percepatan pemekaran dan kemudian mempunyai lobi politik yang di percaya agar bener benar di perjuangkan pemekaran ini.

Ketiga, kurangnya kerja sama, di lihat pada saat meminta dukungan dari dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal ini hanya di lakukan oleh beberapa orang sehingga hampir satu tahun menyelesaikan tugas mengumpulkan dukungan BPD dari setiap desa. seharusnya ini di kerjakan sama-sama agar terjadi percepatan. kemudian di lihat juga di saat pertarungan Pilkada Tahun 2018 ada tiga kandidat di antaranya dua kandidat adalah putra daerah Pantai Timur yang bersaing berebut kursi kekuasaan, hal ini sudah menunjukan bahwa tidak ada kerjasama padahal kedua tokoh ini adalah orang yang berpengaruh di wilayah pantai timur. Seharusnya kedua tokoh ini bekerja sama dalam memperjuangkan pemekaran wilayah Pantai Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ari Wulandari, S.S., M.A. (2015), *Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia*, Yokyakarta; Penerbit Media Pressindo, Cet, Ke-1

Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA, (2003). *Otonomi Daerah Dan Demokrasi Bangsa*, Jakarta Selatan, Yarsifwatampone, Cet Ke-2,

S.Aminah.Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, 2019, Prenademedia Group, Jakarta Timur, Cet Ke 1,

S.P. Varman, (2001). *Teori Politik Modern*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Cet, Ke-6,

Skripsi :

Hendra Pratama (2014*) Peran Elit Politik Terhadap Masyarakat Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar*, Skripsi Ilmu Pilitik, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

La ode risma, (2015), *Analisis Proses Pembentukan Kabupaten Buton Selatan*, *Studi Tentang Tentang Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan*, Skripsi Ilmu Politik Pemerintahan, Makassar; Universitas Hasanuddin.

Muhammad Rifki Pratama. (2010). *Politik Pemekaran Wilayah Kasus Proses Pembentukan Kota Tanggerang Selatan*, Skripsi Ilmu politik, Jakarta fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

Jurnal :

Herman Kombuno (2014), "Pemekaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah",

Kalimantan Utara Berdiri Pada Tanggal 25 Oktober 2012 Dan Resmi Menjadi Propinsi Setelah Lepas Dari Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur.

Lukman santoso (2012), *Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*, supremasi hokum Vol. 1, No. 2, Desember 2012.

Welhelmina selfina beli (2015), *Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT*, Politika, Vol, No, 2, Oktober 2015.

Internet :

Atep Afia Hidayat, *Kab Oki dan Kab Pantai Timur*, http://kpu.go.id/dmdocuments/1602_OKI.pdf , Diakses Tanggal 10 Oktober 2019.

http://www.bps.go.id/mstkab/mf2007, Daftar nama provinsi, kabupaten, kota menurut dasar hukum pembentukan wilayah, di akses pada tanggal 22 november 2019

http://www.kaboki.go.id , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Diakses Tanggal 10 Oktober 2019

http://www.balitbangham.go.id , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di akses tanggal 10 oktober 2019

Kurniawan Agung Wicaksono, RUU DOB Berpotensi Dilimpahkan ke pemerintah baru, 29 september 2014 dalam Http://kabar24.bisnis.com/read/20140929/15/260139/ruu-dob-berpotensi-dilimpahkan-ke-pemerintah-baru, di akses pada 25 maret 2020.

Penetapan RUU DOB kembali mundur dalam http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2014/09/29/298967/penetapan-ruu--dob-kembali-mundur. Di akses pada tanggal 15 maret 2020.

65 DOB di bahas ulang, radar pena.com, 6 Februari 2015, dalam http://radarpena.com/read/2015/02/06/15478/5/2/65-DOB-dibahas-Ulang#sthash.SY3jHaQC.dpuf, di akses pada 25 Maret 2020

Dokumen panitia pemekaran :

Ajar Etikana,(2010) Dokumen Presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI)

Arsip Dokumen presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI)

Media Cetak :

Bupati OKI Di Nilai Melanggar Pantai Timur Mulai Memanas, Harian Umum Kabar Sumatra On Line, Rabu 7 Mei 2014.

Dua Wilayah Siap Dimekarkan, Tribun Sumsel, Kamis 2 Mei 2013.

Muhammad Rohali, Bupati OKI Kaji Ulang Pemekaran Pantai Timur, SindoNews, Minggu 23 Maret 2014

Pantai Timur OKI Minta jadi Kabupaten, Sripo, Jumat, 27 September 2002.

Pantai Timur Menolak OKI Jadi Dua Kabupaten, Sumatra Ekspres, Jum'at 27 September 2002.

Ribuan MPT Tuntut Pemekaran Wilayah Timur, Sumatra Ekspres, Rabu 16 September 2002

Pantai Timur dan Kikim Area Di Usulkan Jadi Kabupaten, Sriwijaya Post, Kamis, 2 Mei 2013